



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Komplek Kepatihan Danurejan
Telepon (0274) 562811 (Psw 1209-1220, 1243-1247, 1253), 589583 Fax. (0274) 586712
website <http://www.bapeda.jogjaprov.go.id> e-mail : bapeda@bapeda.jogjaprov.go.id
Y O G Y A K A R T A Kode Pos 55213

**LAPORAN KEPALA BAPPEDA
PADA PEMBUKAAN MUSRENBANG DIY TAHUN 2017
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2018**

TANGGAL 15 MARET 2017

Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Yth. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS Republik
Indonesia;

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri
RI;

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang
diwakili Direktur Pembiayaan dan Transfer
Non Dana Perimbangan;

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yth. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yth. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Yth. Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yth. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa
Yogyakarta dan atau Pejabat Bupati/Walikota;
Yth. Saudara para Kepala Bappeda tetangga yang
berbatasan dengan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Yth. Saudara Rektor Perguruan tinggi, organisasi
profesi, NGO dan lembaga lainnya;
Para peserta Musrenbang, serta hadirin sekalian
yang kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji
syukur kehadiran Allah SWT, yang karena rahmat,
hidayah dan ridha-NYA kita dapat berkumpul di
tempat ini untuk melaksanakan pembukaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) Daerah Istimewa Yogyakarta guna
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2018.

Pada kesempatan ini perkenalkan kami
mengucapkan terima kasih kepada Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia yang telah berkenan memenuhi permohonan kami untuk membuka sekaligus memberikan arahan.

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Menteri Keuangan yang diwakili Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pengarahannya, sehingga pelaksanaan Musrenbang dapat lebih berkualitas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir memenuhi undangan kami.

Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami hormati,

Proses perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan penyusunan RKPD Tahun 2018, merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2012 –

2017 dan RPJMD 2017 –2022. Penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan draft materi awal RPJMD 2017 – 2022. Penyelerasan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2018 dengan *background study* RPJMD yang ada.

Pada kesempatan ini perlu kami laporkan bahwa,

Sebelum rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 dimulai telah didahului dengan serangkaian acara pra musrenbang, yang meliputi Arahan Gubernur kepada TAPD, Arahan Gubernur kepada SKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Forum konsultasi publik. Kemudian secara umum rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Musrenbang pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Royal Ambarukmo;
2. Forum-forum Tematik yang membahas isu-isu strategis daerah seperti penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan

pendapatan dan respon atas rencana pembangunan Bandara New Yogyakarta International Air Port (NYIA) ;

3. Forum SKPD yang akan membahas secara teknis program dan kegiatan terkait dengan isu-isu strategis yang telah disampaikan dalam Forum Tematik;
4. Forum Kewilayahan/ Forum Kabupaten/Kota sebagai bentuk upaya sinkronisasi antar wilayah;
5. Forum Trilateral Desk;
6. Forum Gabungan sebagai bentuk sinkronisasi lintas sektor dan antar wilayah;
7. Penutupan Musrenbang;
8. Dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan Pasca Musrenbang guna menyempurnakan rancangan akhir RKPD 2018, termasuk di dalamnya mengikuti kegiatan Musrenbangnas dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan Rencana Pusat dan Daerah.

Dalam kegiatan yang beriringan dengan rangkaian pelaksanaan pra-musrenbang juga telah dilaksanakan penilaian terhadap perencanaan

pembangunan Kabupaten-Kota dengan nama Reka Cipta Bhakti Nugraha. Kegiatan ini merupakan bentuk sinkronisasi dengan aktivitas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang juga melakukan penilaian perencanaan di level provinsi dengan nama Pangripta Nusantara.

Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami hormati,

Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 2018 DIY Tahun 2017 diikuti kurang lebih 200 peserta dari berbagai institusi/lembaga, baik dari jajaran birokrasi, legislatif, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan tidak ketinggalan pula Pemerintah Daerah tetangga yang berbatasan dengan wilayah DIY.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah forum musyawarah para pihak/*stakeholders* yang ditujukan untuk:

1. Mematangkan rancangan RKPD 2018 menjadi rancangan akhir RKPD, dengan cara

menyerasikan program kegiatan antar SKPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang kemudian hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD DIY.

2. Menyerasikan rancangan RKPD DIY dengan rancangan RKPD Kabupaten/Kota, dan mendapatkan masukan akhir dalam penyusunan RKPD DIY, yang merinci program/kegiatan prioritas, disertai indikasi pendanaannya.
3. Mensinergikan intervensi yang dilakukan berbagai pihak, berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan dalam penanganan isu-isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan dan respon atas rencana pembangunan Bandara New Yogyakarta International Air Port (NYIA) dan lain sebagainya.
4. Penguatan sinergi Pusat dan Daerah termasuk dengan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan.
5. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan daerah untuk mendukung implementasi program/kegiatan.

Perencanaan pembangunan haruslah memiliki tema sebagai petunjuk dan gambaran dari capaian yang akan diraih dengan proses perencanaan tersebut. Pemilihan tema RKPD DIY 2018 telah dilakukan penyelarasan dengan Tema RKP 2018 dan RPJMN 2015-2019. Adapun Tema RKPD DIY Tahun 2018 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”. Adapun penjelasan singkat dari tema tersebut adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan

multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor lainnya.

Pembangunan infrastruktur ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan akses dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, baik pada infrastruktur layanan dasar maupun infrastruktur untuk mendukung perekonomian.

Pembangunan wilayah di DIY diupayakan dengan melaksanakan pembangunan yang selaras dengan Penataan Ruang yang berbasis keunikan budaya, alam, humanis, dan berwawasan global.

Bapak Menteri, Bapak Gubernur, serta hadirin yang terhormat,

Adapun agenda utama rangkaian acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Sambutan Selamat Datang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kedua, Pembukaan MUSRENBANG DIY tahun 2017 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia sekaligus memberikan arahan,

Ketiga, Pengarahan atau paparan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili dan paparan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, dilanjutkan diskusi.

Keempat atau yang terakhir, Penutup

Bapak Menteri, Bapak Gubernur, serta hadirin yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini, selanjutnya setelah sambutan Bapak Gubernur DIY kami mohon perkenan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia pada saatnya nanti, untuk membuka secara resmi dan sekaligus memberikan arahan pada pembukaan MUSRENBANG DIY tahun 2017 ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pembukaan MUSRENBANG ini, dan apabila dalam penyelenggaraan MUSRENBANG

masih dijumpai hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala,

Tavip Agus Rayanto



Pembukaan Musrenbang 2017

dalam rangka penyusunan

RKPD DIY 2018

Disampaikan oleh:
Tavip Agus Rayanto
Kepala Bappeda DIY

RKPD DIY 2018 sebagai Tahun Pertama *RPJMD DIY 2017-2022*

Visi RPJP DIY
"Daerah Istimewa
Yogyakarta pada Tahun
2025 sebagai Pusat
Pendidikan, Budaya dan
Daerah Tujuan Wisata
Terkemuka di Asia
Tenggara dalam
lingkungan Masyarakat
yang Maju, Mandiri dan
Sejahtera".

tahapan Lima Tahun III (2015–2019) "pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah."

tahapan Lima Tahun IV (2020-2025)
"penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi



Proses Musrenbang 2017

untuk Penyusunan RKPD DIY 2018



Peserta Musrenbang 2017

untuk Penyusunan RKPD DIY 2018

**200
Undangan**



- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri RI;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan;
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
- Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau Pejabat Bupati/Walikota;
- Kepala Bappeda tetangga yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Rektor Perguruan tinggi,
- organisasi profesi,
- NGO dan lembaga lainnya;

Tujuan Penyelenggaraan Musrenbang 2017

untuk Penyusunan RKPD DIY 2018

1. Mematangkan rancangan RKPD 2018 menjadi rancangan akhir RKPD, dengan cara menyerasikan program kegiatan antar SKPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang kemudian hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD DIY.
2. Menyerasikan rancangan RKPD DIY dengan rancangan RKPD Kabupaten/Kota, dan mendapatkan masukan akhir dalam penyusunan RKPD DIY, yang merinci program/kegiatan prioritas, disertai indikasi pendanaannya.
3. Mensinergikan intervensi yang dilakukan berbagai pihak, berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan dalam penanganan isu-isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan dan respon atas rencana pembangunan Bandara New Yogyakarta International Air Port (NYIA) dan lain sebagainya.
4. Penguatan sinergi Pusat dan Daerah termasuk dengan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan.
5. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan daerah untuk mendukung implementasi program/kegiatan.



Tema **RKPD 2018**

Pemerintah



Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Provinsi



Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan

Kabupaten/Kota

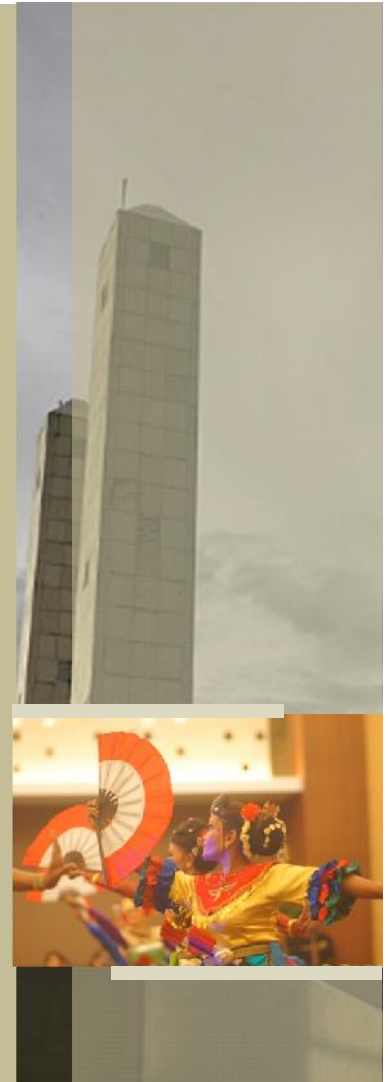


**Sub Tema
RKPD DIY**

Agenda Utama Musrenbang 2017

untuk Penyusunan RKPD DIY 2018

1. Sambutan Selamat Datang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Pembukaan MUSRENBANG DIY tahun 2017 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia sekaligus memberikan arahan,
3. Pengarahan atau paparan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili dan paparan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, dilanjutkan diskusi.
4. Penutup





Terimakasih
matur nuwun





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SAMBUTAN

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PEMBUKAAN MUSRENBANG
PENYUSUNAN RKPD
TAHUN 2017**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yth.:

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili;
- Para Anggota DPD RI – Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
- Para Anggota Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Para Bupati dan Walikota di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Pusat; serta
- Para peserta Musrenbang Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Pertama-tama iijinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Semoga dengan kehadiran Bapak-bapak semua akan menjadikan kualitas musrenbang menjadi lebih baik lagi.

Bapak Menteri serta hadirin yang berbahagia,

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD) Tahun 2018 terasa istimewa, hal ini dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan berakhir pada Tahun 2017. Sementara saat ini, kami sedang mempersiapkan penyusunan dokumen RPJMD periode selanjutnya, yaitu RPJMD Tahun 2017-2022, dan RKPD Tahun 2018 merupakan tahun pertama perencanaan dari periode RPJMD tersebut. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dan kesempatan bagi kami. Menjadi tantangan karena kami dituntut untuk menyusun perencanaan tahunan tanpa adanya dokumen perencanaan jangka menengah sebagai acuan. Namun, ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk berkreasi, membuka sel-sel pemikiran kami untuk berimajinasi mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik dan maju.

Tentu semua itu tetap harus sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Kami tetap harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMN serta Rancangan RKP yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat, sehingga tetap terjalin sinergi dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Hadirin peserta Musrenbang yang Saya hormati,

Musrenbang merupakan amanat peraturan perundangan sebagai salah satu rangkaian proses dalam penyusunan dokumen perencanaan. Forum Musrenbang ini mempunyai arti penting, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang telah disusun pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Bappeda dalam laporan pelaksanaan Musrenbang telah menyampaikan

seluruh rangkaian proses yang telah dan akan dilakukan dalam penyusunan RKPD. Saya berharap, seluruh rangkaian proses itu menjadi sarana bagi kita semua untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita sama-sama cintai dan banggakan.

Peserta Musrenbang yang terhormat,

Dalam tata kelola pemerintahan, Pemerintah Daerah DIY, dalam beberapa aspek memang sudah baik. Hal ini ditandai dengan adanya apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah terkait kinerja pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari sisi akuntabilitas kinerja, sudah 2 tahun ini Pemerintah Daerah DIY mendapatkan nilai tertinggi pada level provinsi dan mendapatkan nilai A. Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah DIY juga selalu mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya dari sisi perencanaan, kita juga sudah beberapa tahun ini mendapatkan apresiasi dan penghargaan Anugrah Pangripta Nusantara dari Pemerintah.

Apresiasi dan penghargaan tersebut tentu bukan menjadi tujuan utama kita, yang lebih penting adalah bagaimana proses pemerintahan yang kita lakukan ini, memberikan kontribusi yang positif terutama bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa indikator pembangunan juga menunjukkan bahwa posisi DIY sudah baik. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia, DIY berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta. Dalam hal kesejahteraan, DIY juga tercatat sebagai kawasan yang paling stabil dan berada di peringkat ketiga setelah DKI dan Bali, demikian halnya dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang mendapatkan penilaian terbaik.

Namun demikian, kita juga harus ingat, bahwa kita masih memiliki tantangan-tantangan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Angka kemiskinan yang masih tinggi di atas rata-rata nasional, indeks ketimpangan wilayah serta indeks ketimpangan pendapatan yang masih

tinggi, itu semua adalah tantangan-tantangan yang masih kita hadapi. Untuk itu perlu pemikiran dan kerja keras kita semua, selaku *stakeholder* pembangunan di DIY.

Oleh karena itu perlu penjabaran dalam strategi pembangunan, *Pertama*, pembangunan hendaklah dilaksanakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi yang terkait. *Kedua*, pembangunan sumberdaya manusia harus memuliakan manusia untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. *Ketiga*, pembangunan diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Keempat*, pembangunan dilakukan agar tidak menimbulkan disparitas. Dan *kelima*, pembangunan diperhatikan agar tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.

Semua strategi tersebut, tentu perlu diimplementasikan untuk menopang dimensi-dimensi dalam pembangunan daerah, yaitu: **Dimensi Manusia** yang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan dan

keterlindungan warga. **Dimensi Ekonomi Unggulan**, yang meliputi pariwisata, industri kreatif, industri kecil dan menengah serta jasa. Serta **Dimensi Pemerataan**, yang meliputi antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Kesemua dimensi tersebut tetap harus memperhatikan budaya sebagai pengarusutamaan pembangunan di DIY.

Dengan melihat tantangan-tantangan tersebut, Saya kira cukup relevan dengan Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, yaitu: ***“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.”***

Tema tersebut, tentu juga telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Selanjutnya, Saya juga meminta kepada Bapak/Ibu Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelaraskan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten/Kota

dengan tema pembangunan di provinsi dan pusat.

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, izinkanlah Saya menyampaikan beberapa harapan kepada para pemangku kepentingan yang turut berperan dalam pembangunan di DIY:

Pertama, kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan program dan pendanaan terkait dengan upaya mengatasi isu-isu pembangunan yang masih dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti kemiskinan, pengangguran terdidik, ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan. Selain itu juga dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang dapat memberikan dampak hingga nasional bahkan internasional.

Kedua, kepada DPRD DIY sebagai mitra kerja pemerintah daerah agar dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam merumuskan program dan pendanaan yang lebih *pro poor*.

Ketiga, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY agar memberikan dukungan program dan pendanaan untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan dasar, sekaligus untuk mewujudkan indikator-indikator pembangunan yang telah disepakati bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, yang terkait dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas ekonomi, penguatan kapasitas infrastruktur dan penguatan kapasitas tatakelola pemerintahan.

Keempat, kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tetangga untuk secara bersama-sama mewujudkan sinergitas program dan kegiatan utamanya pada daerah perbatasan.

Kelima, kepada Perguruan Tinggi/Akademisi untuk memberikan sumbangsih pemikiran

konkrit dan implementatif dalam menghadapi isu dan tantangan pembangunan daerah.

Keenam, kepada rekan-rekan LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi untuk memberikan saran masukan, kritik yang bersifat membangun dan solutif.

Ketujuh, kepada Dunia Usaha / Swasta untuk mengembangkan pola kemitraan (CSR), dukungan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kedelapan, kepada Masyarakat luas untuk selalu berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Saya berharap, dan tentu kita semua berharap, forum musrenbang yang akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan ini, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Marilah bersama-sama kita *gumregah* untuk mewujudkan Jogja yang Istimewa.

Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia,

Sebelum Saya mengakhiri sambutan ini, kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan yang telah hadir dan nantinya berkenan memberikan arahan dalam Musrenbang kali ini, Saya atas nama masyarakat DIY sekali lagi mengucapkan terima kasih.

Sekian,

Wassalamu'

Alaikum

Warahmatullahi

Wabarakatuh.

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rancangan Awal RKP 2018

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas**

Disampaikan dalam Pembukaan Rangkaian Musrenbang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Kerangka Paparan



1

Pengantar

Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan **Money Follow Program**.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial** dengan memperhatikan pada:
 - Pengendalian perencanaan
 - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
 - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
 - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Perkuatan Implementasi *Money Follow Program*



Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*

1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (*Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU – PINA*)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data *sharing* (*Bappenas-KemKeu-Menko*) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

Pengendalian Perencanaan

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Borobudur dan Sekitarnya

KEMENTERIAN/LEMBAGA	Target	(Rp M)	Lokasi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
▪ Pengerukan alur masuk Pelabuhan Tanjung Mas	1 paket	28,07	Kota Semarang
▪ Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta		200,00	Kab. Magelang
▪ Pembangunan Jalur Ganda Kroya – Kutoarjo		895,00	Kab.Kutoarjo
▪ Jalur KA menuju Bandara Adisumarmo		3,00	Kota Solo
BUMN			
▪ Pengembangan Bandar Udara Kulon Progo	1 paket		Kab. Kulon Progo
KEMENTERIAN PARIWISATA			
▪ Proyek Promosi produk destinasi wisata Borobudur dskt melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah	4 paket	10,7	Luar Negeri
▪ Proyek Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan daya saing produk UKM sektor Pariwisata	840 orang	1,58	Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

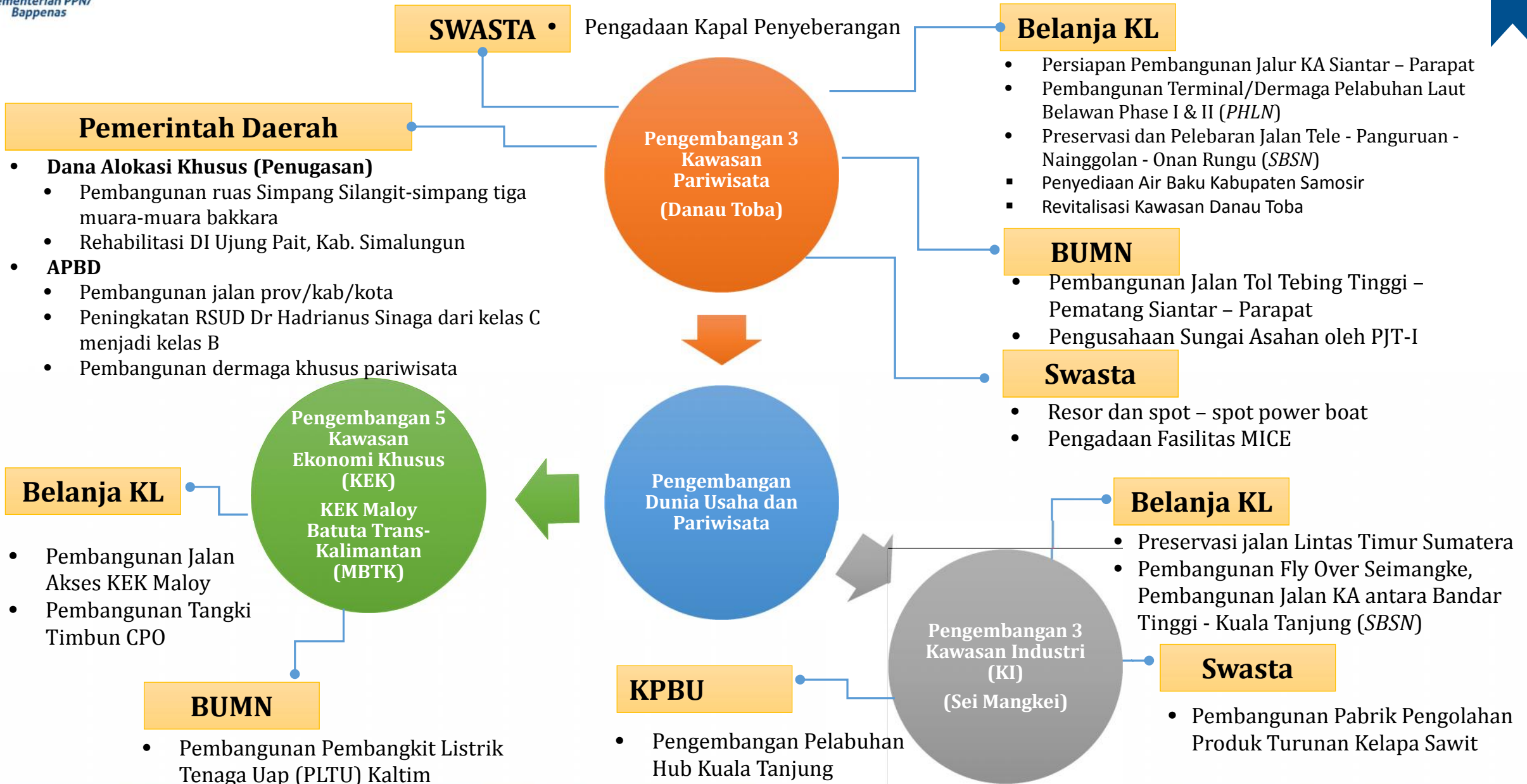
1. Pembangunan Sarpras Transportasi
2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan : KSPN Borobudur dan Sekitarnya



Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan



RANCANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2018

RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018

DAK REGULER		DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan		Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>Area/Spatial Based</i>).	Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
1. Pendidikan	10. Pariwisata	1. Kesehatan (Puskesmas)	1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB	11. Jalan	2. Perumahan dan Permukiman	2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3. Air Minum		3. Transportasi	3. Air Minum
4. Sanitasi		4. Pendidikan	4. Sanitasi
5. Perumahan dan Permukiman		5. Air Minum	5. Jalan
6. Pasar		6. Sanitasi	6. Irigasi
7. IKM			7. Pasar
8. Pertanian			8. Energi Skala Kecil
9. Kelautan dan Perikanan			9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat **penambahan 4 bidang DAK Reguler baru** yaitu **Air Minum dan Sanitasi** untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta **Pasar dan Jalan** untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.

Terdapat penambahan **3 bidang DAK Afirmasi baru** yaitu **Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi**, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.

Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan **1 bidang DAK** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Terdapat bidang – bidang yang **kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK**, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

2

Kerangka Makro dan Wilayah

Asumsi Ekonomi Makro 2018



INDIKATOR EKONOMI	Skenario 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1 (5,5 – 6,1)
Inflasi (%): average	3,5 ± 1
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.600
ICP (USD/Barrel)	55
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	730
Lifting Gas (BOE/hari)	1.150

Resiko

- Asumsi ekonomi makro 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia.
- Harga minyak dunia yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan. Namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi

Arahan Bapak Presiden pada Sidkab Paripurna November 2016

Untuk APBN 2018, Presiden menginstruksikan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Selama 3 tahun pemerintahan, pertumbuhan ekonomi sempat berada di bawah 5%, yaitu 4,8% pada 2014 dan 5% pada 2015. Indonesia belum pernah tumbuh mendekati 6%. Presiden mengharapkan agar hal ini dapat diupayakan bersama

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Produksi

6 Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah:



3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:



Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Komponen Sisi Produksi	Pertumbuhan (%)	Share (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
PDB	6,1	100	6,1
- Industri Pengolahan	5,7	20,2	1,2
- Konstruksi	8,5	11,8	0,9
- Perdagangan	6,3	13,1	0,8
- Informasi dan Komunikasi	11,9	3,7	0,6
- Jasa Keuangan	11,5	4,5	0,5
- Pertanian	4,0	12,8	0,5
- Transportasi	8,2	5,5	0,3
- Listrik dan Gas	6,1	1,2	0,06

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran

Komponen Sisi Pengeluaran	Pertumbuhan Tahun 2018 (%)	
	Baseline	Skenario
PDB	5,2	6,1
- Konsumsi RT	5,2	5,4
- Konsumsi LNPRT	8,5	9,6
- Konsumsi Pemerintah	4,6	5,3
- Investasi (PMTB)	5,5	8,0
- Ekspor	1,7	2,2
- Impor	1,7	2,6

Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen Persen

Konsumsi dan investasi harus menjadi pendorong pertumbuhan

Kebutuhan Investasi: Rp 5.356,5 T



Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal



- Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata
- Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik



Peranan Pemerintah untuk Mendorong 6,1 Persen

Untuk mencapai 6,1 persen..... **Perlu Kerja Keras dan Langkah Konkrit**

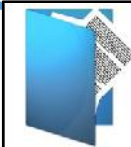


UPAYA PEMERINTAH



Investasi Pemerintah secara selektif

- ✓ Ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga **dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi**
- ✓ Fokus pada proyek yang **mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta**:
 - a. Infrastruktur listrik
 - b. Infrastruktur transportasi dan logistik
 - Pelabuhan (penurunan *dwelling time*)
 - Pergudangan
 - Jalan → untuk mendukung konektivitas



Fasilitasi Kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi

- ✓ **Peningkatan Investasi Swasta**
 - **Perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama** (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi, dan jasa keuangan)
 - Deregulasi peraturan investasi (peningkatan kemudahan berusaha, EoDB menuju peringkat 40)
 - **Pembenahan iklim investasi di daerah**
 - **Fasilitasi masalah investasi** (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi)
 - Pemanfaatan dan penyaluran **dana repatriasi untuk investasi**
 - Perbaikan **iklim ketenagakerjaan**: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)
- ✓ **Menjaga Daya Beli Masyarakat**
- ✓ **Reformasi Struktural**

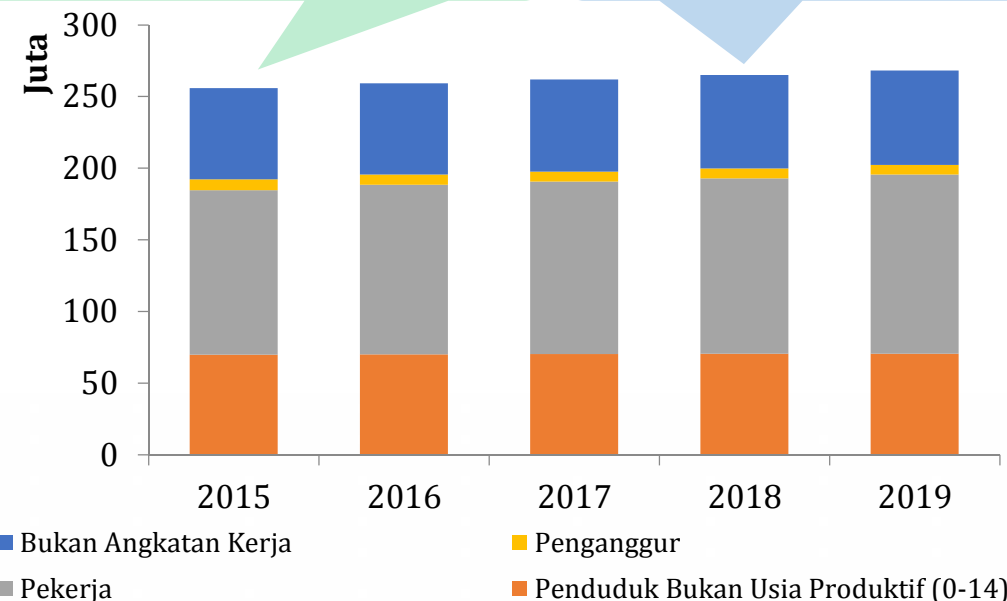
Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2018

TAHUN 2016

Jumlah penduduk miskin sekitar 27,8 juta jiwa
(Sumber: BPS, Sept 2016)

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa



TAHUN 2018



Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta



Penduduk Usia Produktif (15+): 194,5 juta



Angkatan Kerja: 129,4 juta



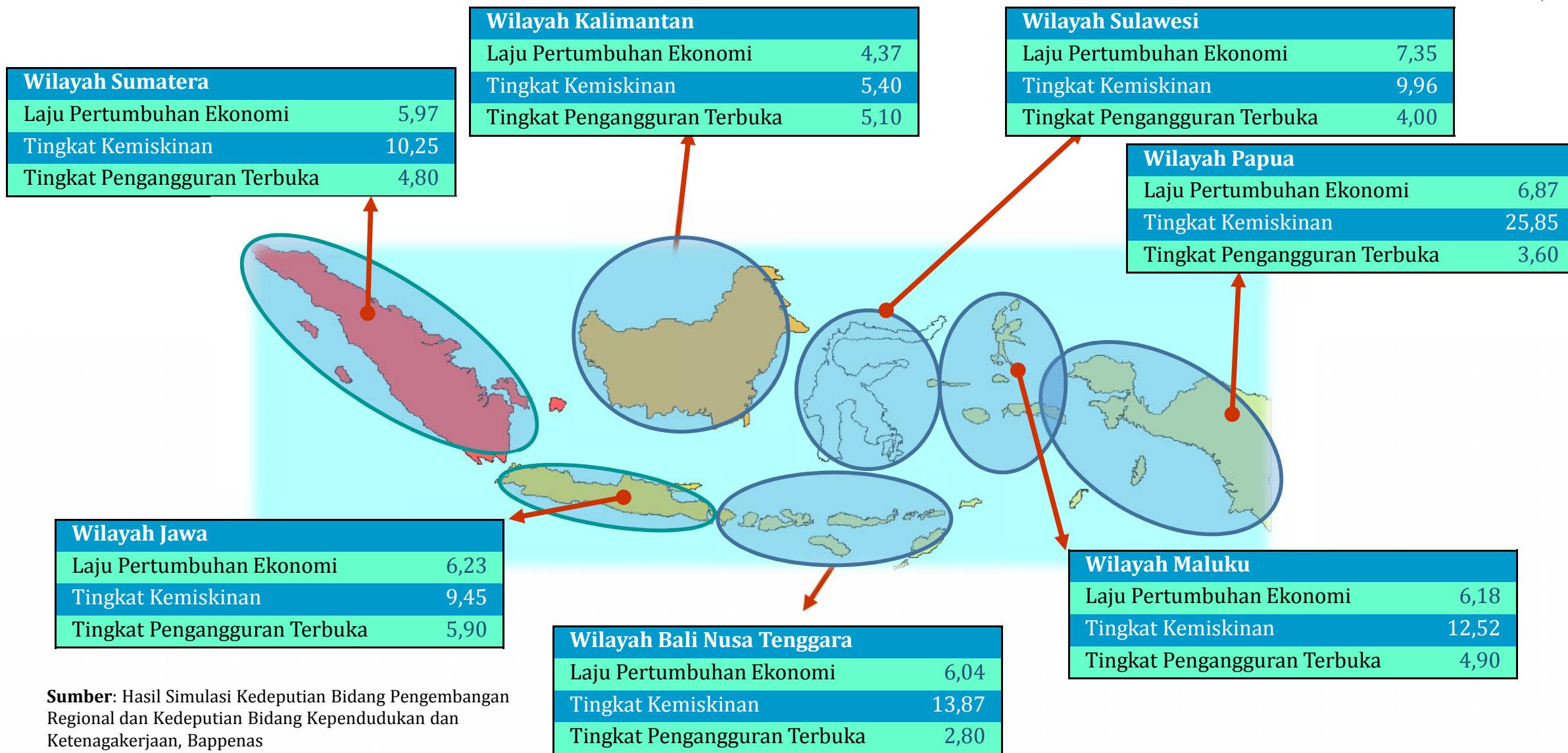
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan 67%

TARGET PEMBANGUNAN 2018

- Target tingkat kemiskinan: 9-10%
- Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5%
- Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Pertumbuhan Nasional 6,1 Persen



Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tahun 2018

18

Pariwisata Kep.Seribu
Kab. Kep.Seribu, DKI Jakarta

TOL PEMBANGUNAN JALAN AKSES
TOL CIMANGGIS - NAGRAK

JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG EMAS

JALUR KA MENUJU BANDARA KERTAJATI

TOL SOLO-
KERTOSONO

JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG PERAK

Pelabuhan Tanjung Priok

Bandara Kertajati

Pelabuhan Tanjung Emas

Pelabuhan Tanjung Perak

KEK TANJUNG LESUNG
Kab. Pandeglang, Banten

PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA
ANTARA MAJA-RANGKAS BITUNG
(SBSN)

TOL PEMBANGUNAN JALAN TOL
CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN
PHASE II DAN III

REAKTIVASI JALUR KA MAGELANG - YOGYAKARTA
JALUR KA MENUJU BANDARA KULONPROGO

KI Kendal
Kab. Kendal, Jawa Tengah

Pariwisata Borobudur dan sekitarnya
Kab. Magelang, Jawa Tengah

- Peningkatan struktur jalan dari Semarang - Magelang - Yogyakarta
- Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)
- Peningkatan kapasitas dan kualitas Bandara Kulon Progo

KI Gresik
Kab. Gresik, Jawa Timur

Pariwisata Bromo-Semeru
Jawa Timur

- JALUR GANDA KA MADIUN JOMBANG (SBSN)
- KEDUNGBANTENG-MADIUN (SBSN)

Wilayah Jawa 2018

Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23
Sasaran Tingkat Kemiskinan	9,45
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90



Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :

1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Banten

Sektor-sektor penggerak perekonomian

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran
3. Konstruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- Modernisasi Jaringan Irigasi DI. Rentang
- Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Kali Bekasi, Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Cisadane
- Pembangunan Bendung DI. Kamijoro Kab. Bantul
- Pembangunan Bendungan: Bener, Ciawi, Cipanas, Leuwikeris, Sukamahi, Sindang Heula, Way Sekampung, Bendo, Gondang, Pidekso, Tukul
- Pembangunan DI. Progo Pistan Kab. Temanggung
- Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 2

-  Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
-  Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

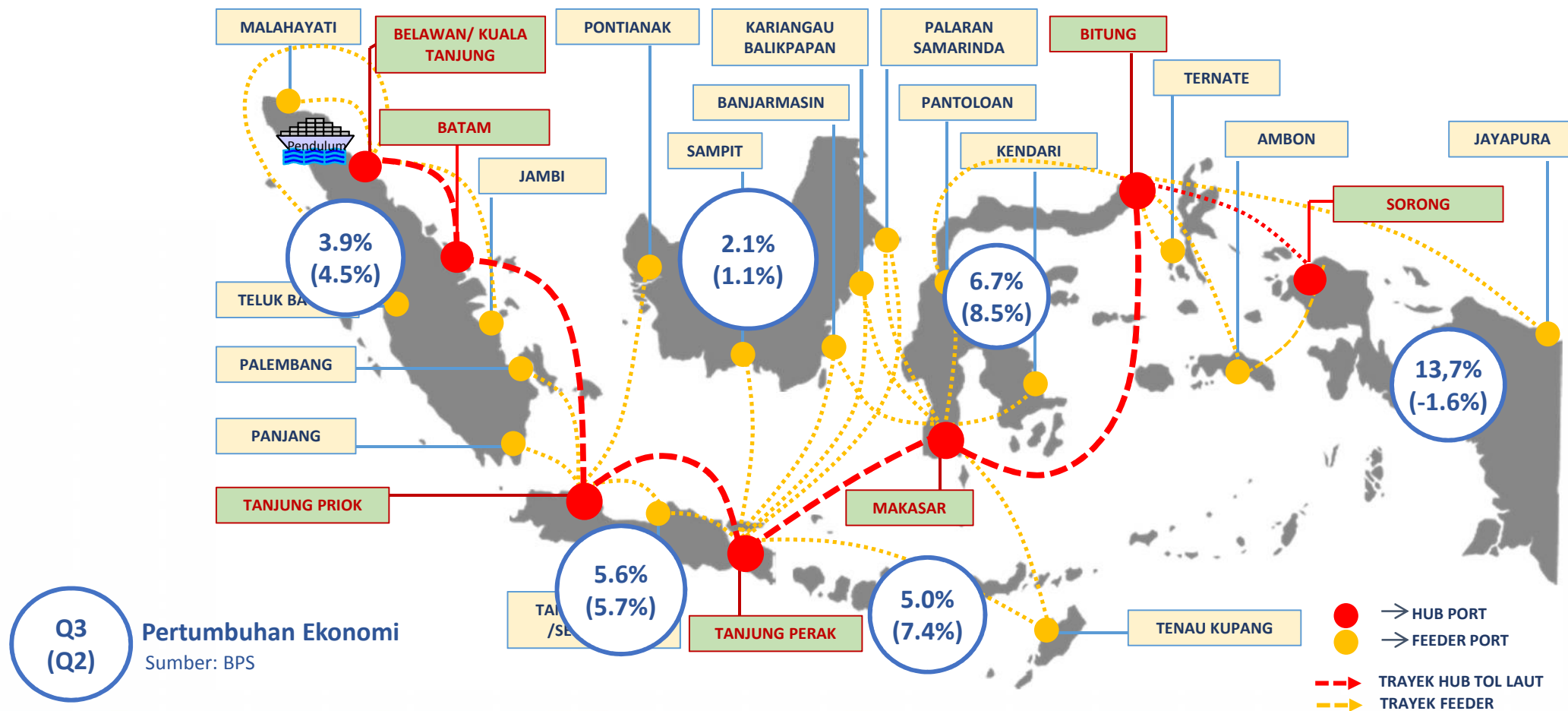
- PLTA: Jatigede, Upper Cisokan, Rajamandala

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :

1. Provinsi D.I Yogyakarta
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Jawa Barat

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

“Untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistik”



3

Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas

Rancangan Tema RKP 2018

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

- Memperbaiki **Kualitas Belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing** dan **nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur



Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

RKP 2015*)	RKP 2016	RKP 2017	RKP 2018	RKP 2019
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah	MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN	<i>Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019</i>

Penajaman Prioritas Nasional

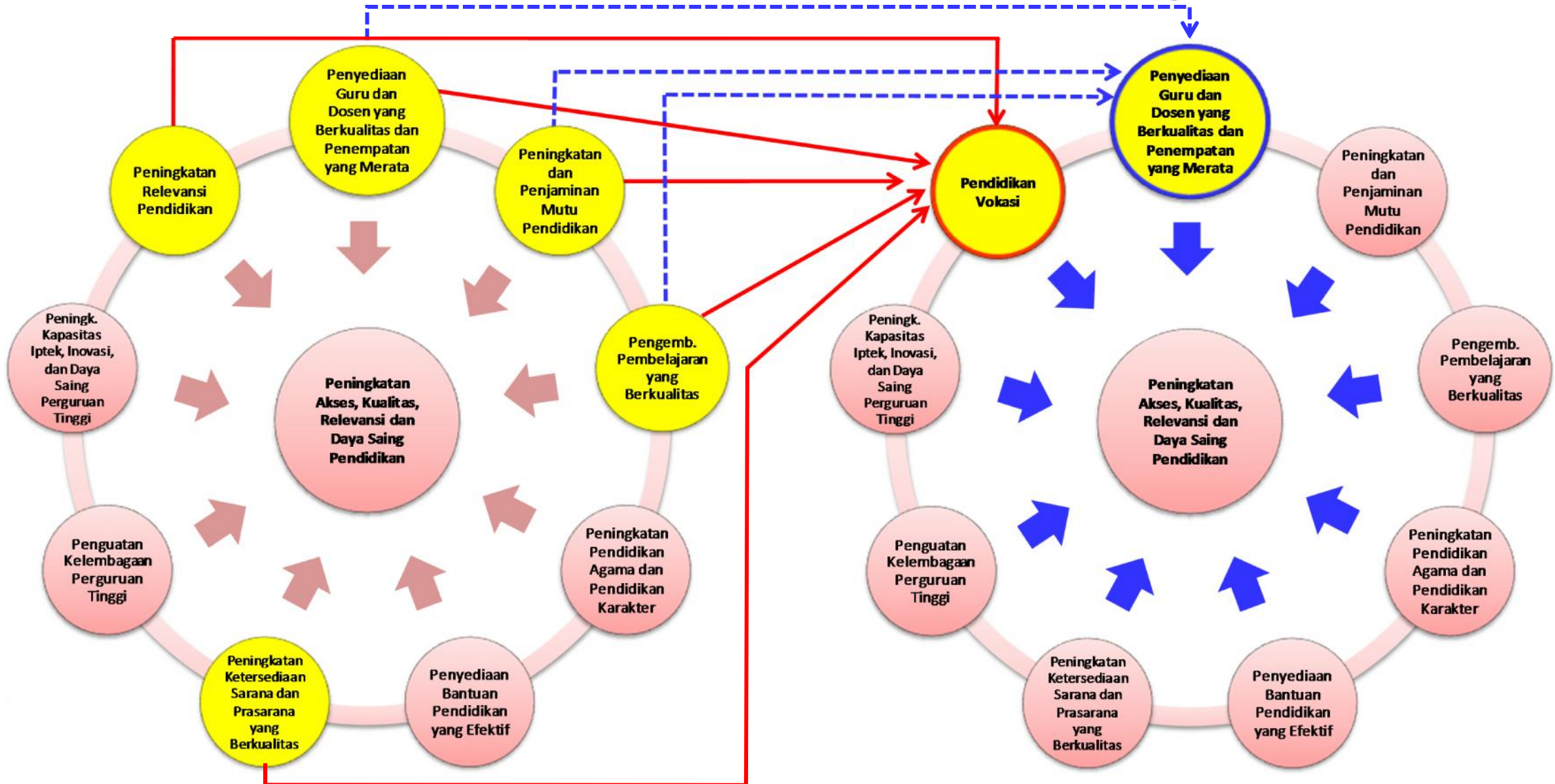
URAIAN	RKP 2017	RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional	23	10
Program Prioritas	88	30

- Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan
- Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Contoh Penajaman Program Prioritas: Prioritas Nasional Pendidikan

RKP 2017

Rancangan RKP 2018



RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018

24

Revolusi Mental

Kesetaraan
Gender

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua


X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN


27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi


Perubahan
Iklim

Pemerataan

Tata kelola
Pemerintahan
yang Baik

 = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya

 = Highlight prioritas pada slide selanjutnya

 = Pengarusutamaan/Mainstreaming

Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Danau Toba

PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Pembentukan Kelembagaan Destinasi

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan

Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib

Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan

Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib

Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Mandalika

PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan

Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib

Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

KEGIATAN PRIORITAS

Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas*

PROYEK PRIORITAS

Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang

Pembentukan Kelembagaan Destinasi

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Penyediaan Regulasi dan Fasilitas untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata

Penyediaan regulasi dan fasilitas untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata

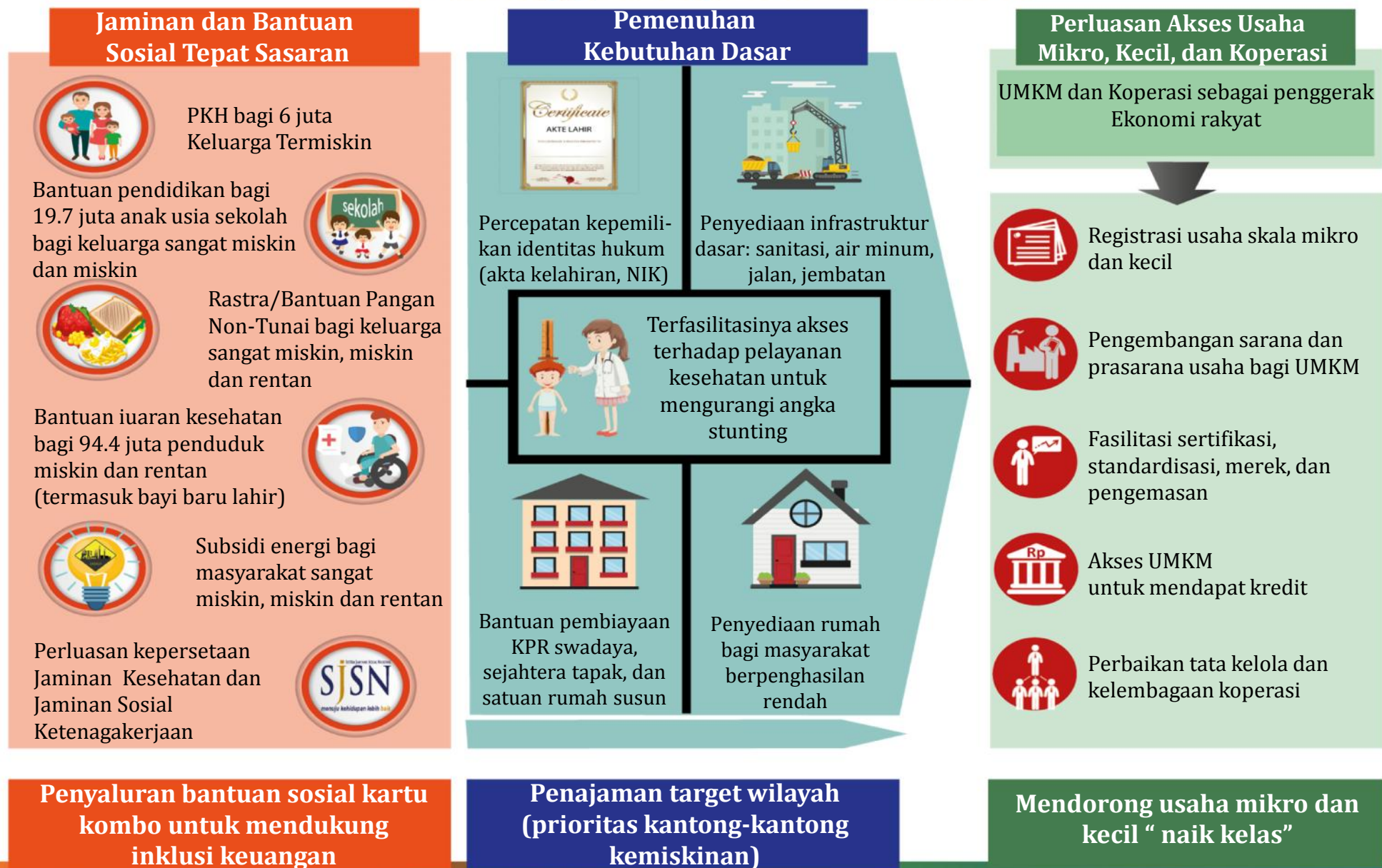
Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi)

*7 destinasi prioritas lainnya yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung

Pelaksana:

Kementerian Pariwisata, Kemenkeu, KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenLHK, KemenKKP, POLRI, BNPB, Kemendikbud, KemenESDM, BKPM, BPS, Pemda

Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan



Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional

Penyediaan Pelayanan Dasar

-  Akses Air Minum 100%
-  Akses Sanitasi 100%
-  Rasio Elektrifikasi 96.6%
-  Akses Perumahan Layak Huni
-  Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal
-  Keamanan dan Keselamatan Transportasi
-  Pengendalian Banjir



Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan



Sektor Unggulan

-  Pertanian
-  Industri Pengolahan
-  Jasa & Pariwisata

Infrastruktur Perkotaan

-  Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan, Rel & Intermoda
-  Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan



Avoid	Shift	Improve
Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan	Peningkatan Pangsa Angkutan Umum	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

-  Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
-  Energi untuk Transportasi Perkotaan
-  Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

4

Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018

Dasar Hukum Yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah

1. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
2. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.
3. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa **koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.**
4. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa **RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**

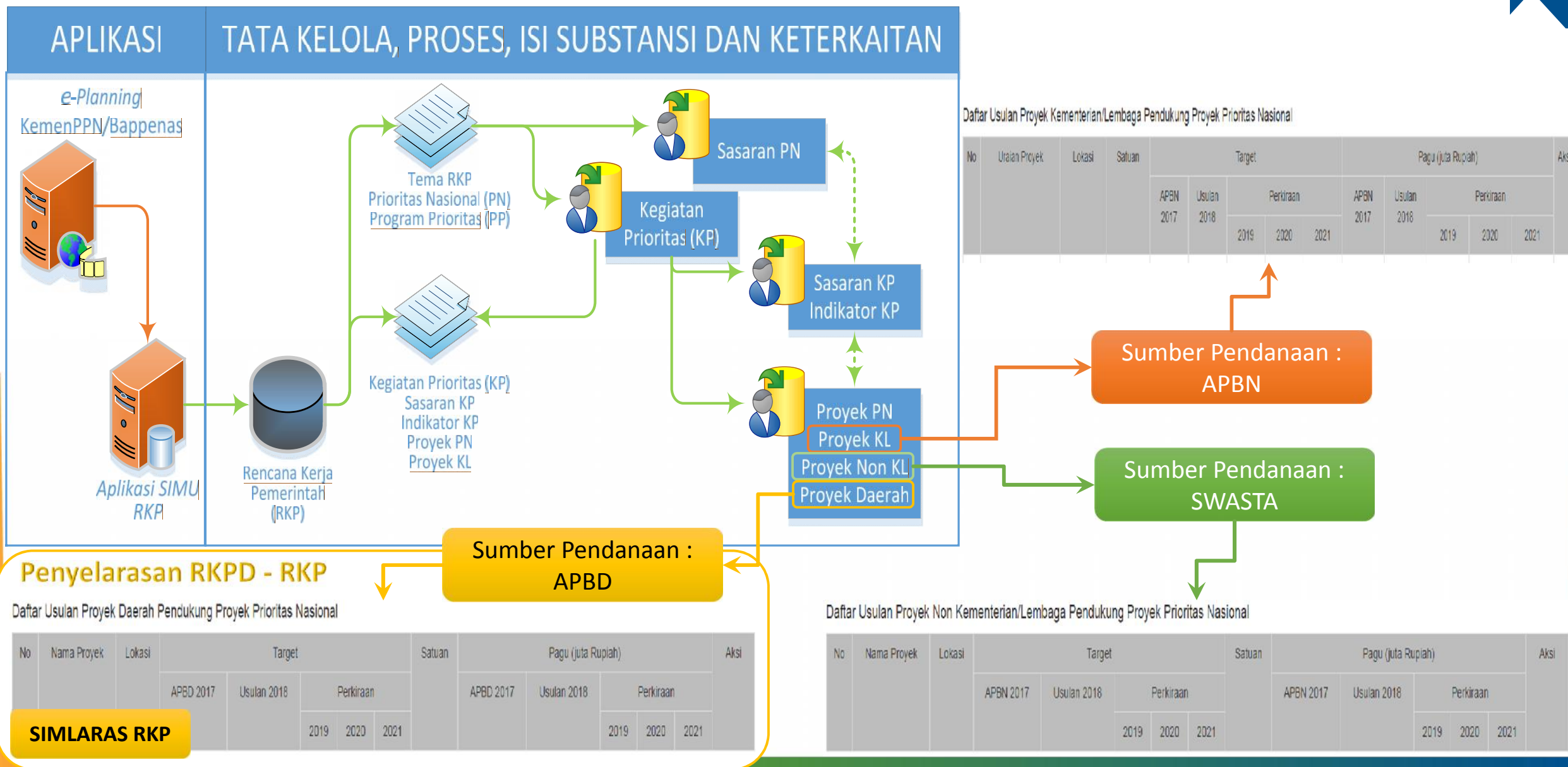


Tahapan Penyelarasan RKPD dan RKP 2018 (1/2)

- Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk :
 - Mendukung **koordinasi antarpelaku pembangunan**
 - Menjamin **terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.**
- Pencapaian **sasaran dan prioritas pembangunan nasional**,
 - Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri.
 - Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, spt pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll.
 - Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional** harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- Saat ini,
 - Sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah.
 - Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemerintah pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional.

Tahapan Penyelarasan RKPD dan RKP 2018 (2/2)

- Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan *money follows program* yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan *Tematik, Holistik, Integratif* dan *Spasial*.
- **Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi** sebagai wakil pemerintah pusat di daerah **dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional** yang ditujukan untuk :
 - Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);
 - Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD);
 - Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).
- Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah → forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP,
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional → forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP

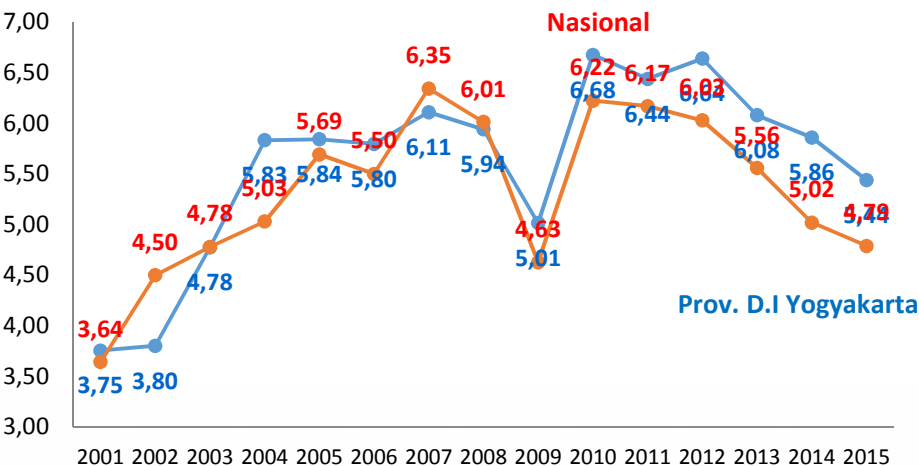


5

Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP 2018 di Provinsi DI Yogyakarta

Arah Kebijakan Makro Provinsi D.I Yogyakarta

Laju PDRB Provinsi D.I Yogyakarta Vs. PDB (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalkulasi Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas

No	Provinsi	Tingkat Kemiskinan				Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015
		Realisasi ^{a)}		Proyeksi Target		
		2015	2016	2017	2018	
1	DKI Jakarta	3,93	3,75	3,50	3,23	1
2	Jawa Barat	9,53	8,95	8,68	8,32	14
3	Jawa Tengah	13,58	13,27	12,52	12,10	26
4	DI Yogyakarta	14,91	14,05	13,80	13,63	3
5	Jawa Timur	12,34	12,05	11,49	11,06	25
6	Banten	5,9	5,42	5,42	5,11	1
7	Bali	4,74	4,25	4,21	4,14	-

Keterangan: *) Realisasi angka kemiskinan bulan Maret

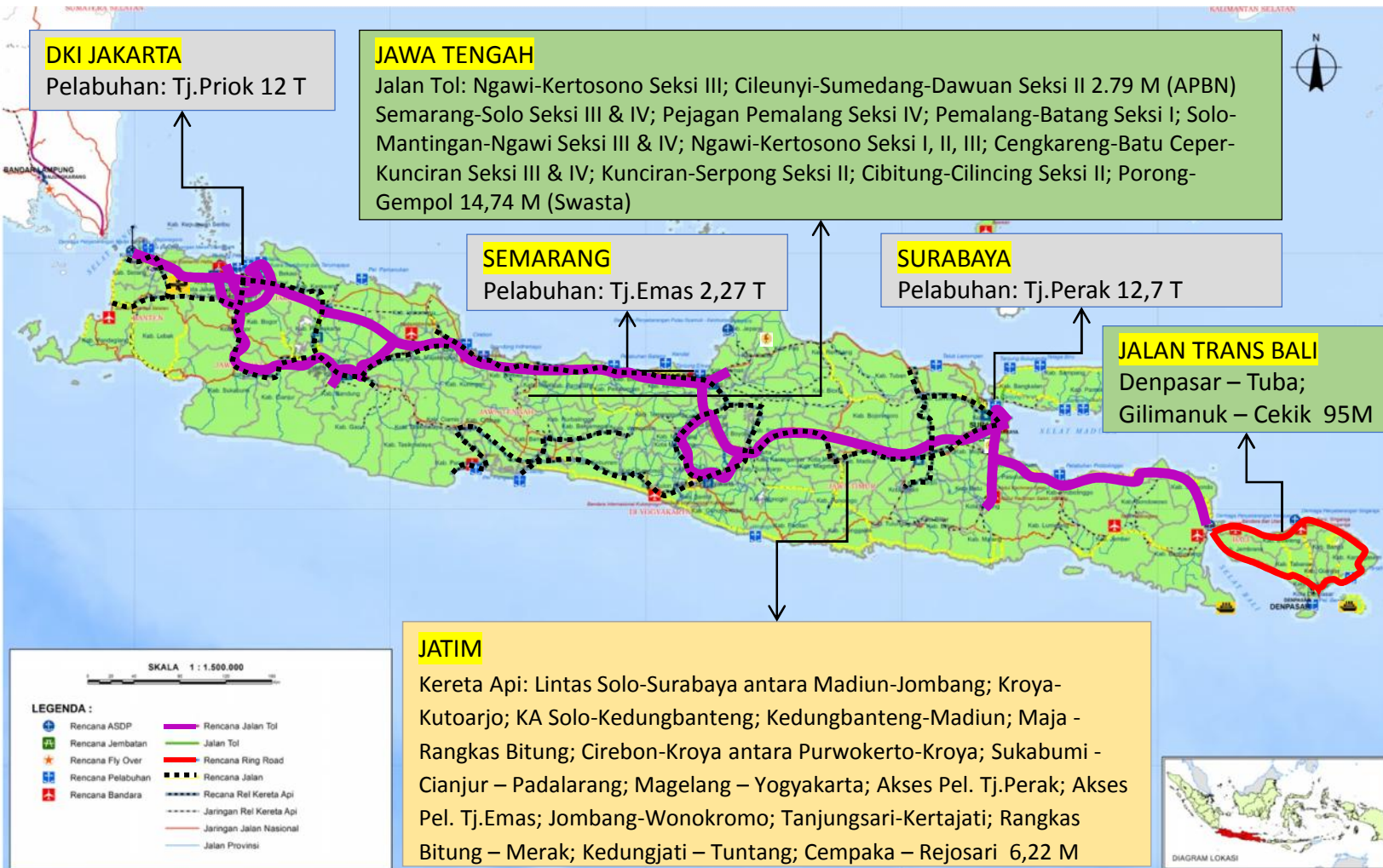
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di DIY diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,02 persen*, dengan tingkat kemiskinan 13,63 persen*.

Keterangan: *) Proyeksi dalam Rancangan Awal

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY didukung oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Konstruksi, dan Sektor Jasa Pendidikan dengan kontribusi total sebesar **51,84%**. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan kelima sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi DIY.

	Provinsi DIY	Share ADHB						Growth ADHK				
	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,21	10,94	11,19	10,20	10,52	10,70	-1,63	5,13	2,26	-2,10	2,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,63	0,64	0,60	0,53	0,58	0,57	7,28	1,67	3,92	2,11	0,13
3	Industri Pengolahan	14,25	14,40	13,26	12,48	13,59	13,05	5,39	-2,84	6,87	3,82	1,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,13	0,12	0,09	0,10	0,09	5,63	10,20	6,08	3,67	-1,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,12	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,31	3,46	0,95	3,91	2,78
6	Konstruksi	9,56	9,51	9,52	8,70	9,40	9,37	4,85	4,46	4,94	5,65	4,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,96	8,14	8,30	7,49	8,27	8,23	5,12	8,66	5,26	5,69	6,19
8	Transportasi dan Pergudangan	5,65	5,50	5,51	5,16	5,72	5,68	3,94	4,73	6,10	3,80	3,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,87	9,05	9,32	8,94	10,04	10,24	5,69	6,82	7,13	6,79	5,77
10	Informasi dan Komunikasi	9,56	9,39	9,49	8,18	8,51	8,13	9,55	10,74	6,22	6,13	5,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	3,38	3,49	3,42	3,88	3,97	11,33	3,23	11,50	8,27	8,27
12	Real Estat	6,95	6,85	7,03	6,28	7,00	7,05	4,47	8,88	4,01	7,77	6,45
13	Jasa Perusahaan	1,12	1,10	1,08	9,24	1,03	1,03	6,57	7,99	3,27	7,61	7,31
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,39	7,32	7,68	7,24	8,07	8,23	4,64	7,49	4,94	5,90	5,18
15	Jasa Pendidikan	8,39	8,48	8,24	7,36	8,19	8,48	7,62	5,26	4,58	7,91	7,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,38	2,45	2,50	2,26	2,45	2,52	6,52	9,18	7,00	7,65	7,15
17	Jasa lainnya	2,66	2,62	2,57	2,32	2,53	2,55	6,83	4,28	4,86	5,29	8,00
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94

Jalur Utama Logistik Pulau Jawa-Bali



Proyeksi pertumbuhan ekonomi pulau Jawa dengan terselenggaranya tol laut, dalam jangka pendek (2019) 8,12% dan dalam jangka panjang (2039) 7,99%

Terselenggaranya Tol Laut akan meningkatkan kapasitas layanan Pel. Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehingga dapat melayani kapal 4rb TEU's, serta Pel. Tanjung Emas sehingga dapat melayani kapal 2,5rb TEU's.

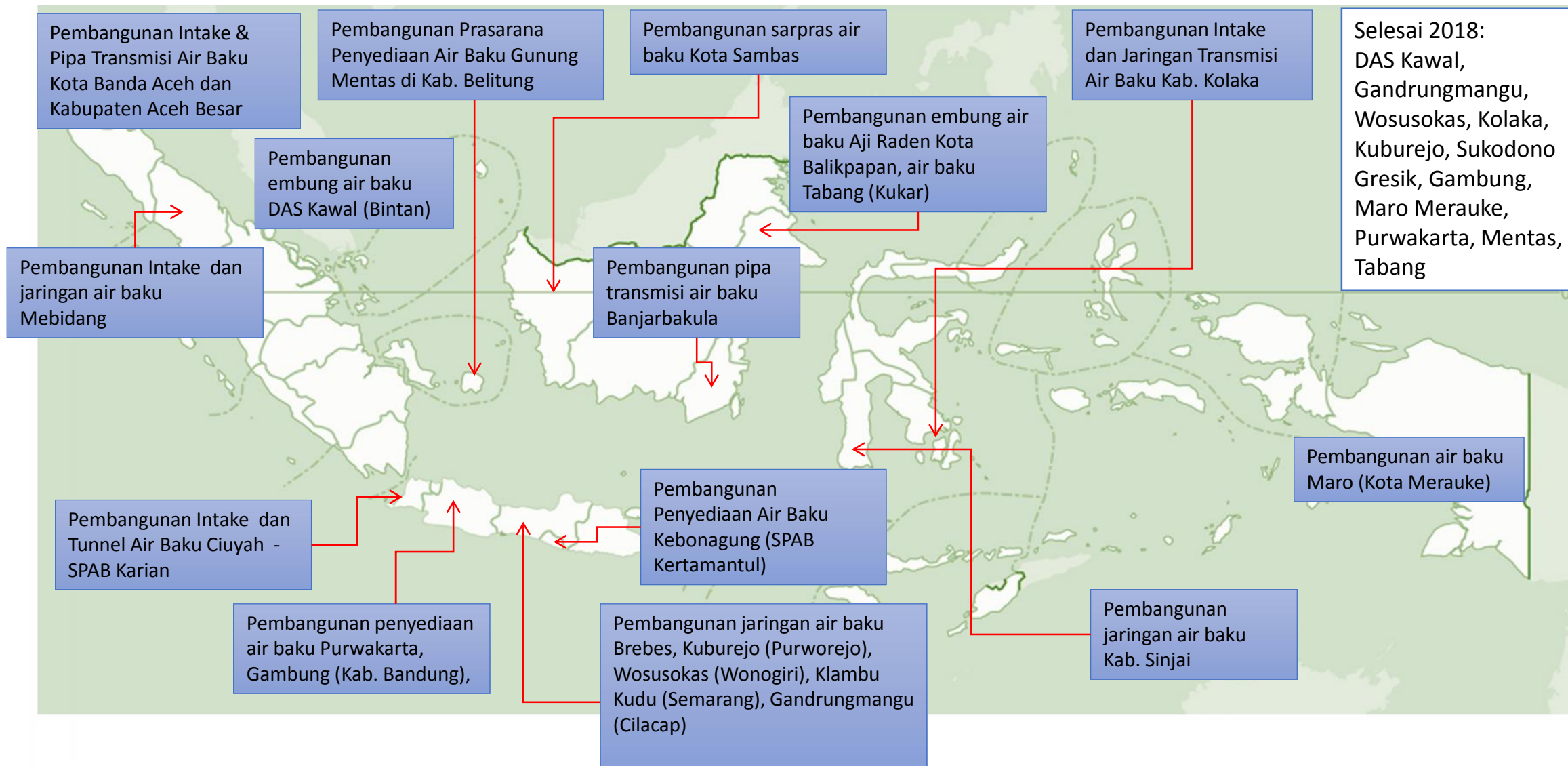
Pembangunan Jalan dan Kereta Api Lintas (Trans) Jawa-Bali akan meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang disebabkan oleh tingginya kapasitas layanan yang diberikan.

HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN *)

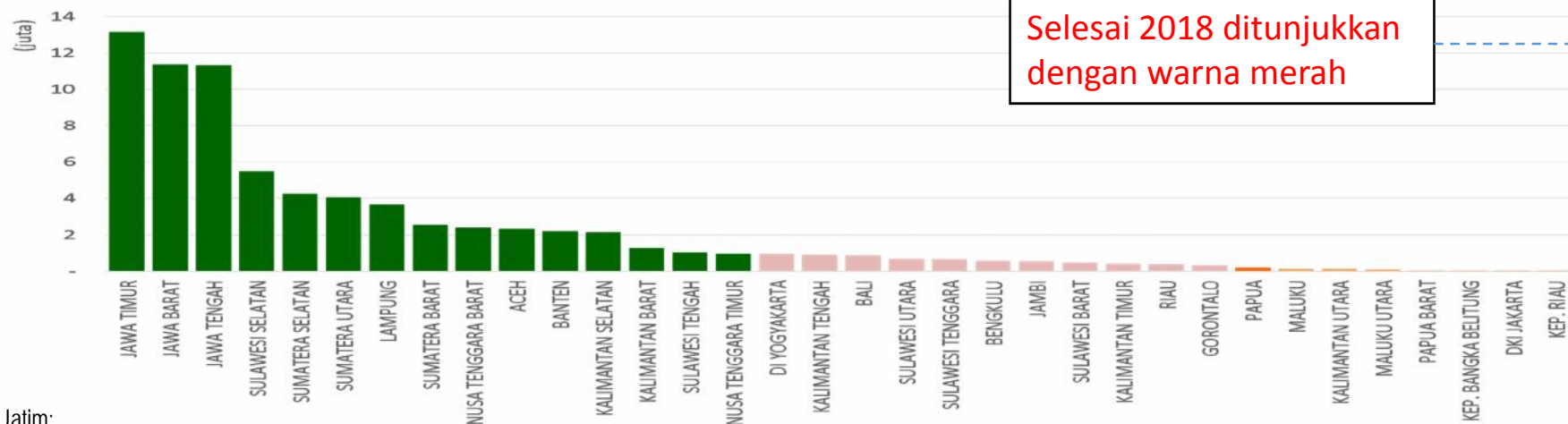
PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA)						
Kegiatan Prioritas : Konektivitas						
Proyek Prioritas Nasional	Proyek KL	Instansi Pelaksana	Program	Kegiatan	Output	Lokasi
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik	Pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa Ruas Kr. Nongko - Legundi - Duwet	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pembangunan Jalan	Provinsi Di Yogyakarta
Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Embung	OP Bendungan, Embung Untuk air Baku, Embung, Situ, Danau PROVINSI DI YOGYAKARTA	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	Terjaminnya kinerja layanan irigasi seluas 3,3 juta ha	Provinsi Di Yogyakarta
Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Banjir, Kanal, dan Pengamanan Pantai PROVINSI DI YOGYAKARTA	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	Meningkatnya perlindungan di 15 kawasan terhadap banjir menuju periode ulang 25 tahunan	Provinsi Di Yogyakarta

*) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Konektivitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU TAHUN 2018



KEGIATAN PRIORITAS IRIGASI PADA SENTRA PRODUKSI PADI TAHUN 2018



Selesai 2018 ditunjukkan
dengan warna merah

Jateng:

1. Rehab D.I. Sidorejo (Kab. Grobogan)
2. Rehab D.I. Klambu (Kab. Demak)
3. Rehab D.I. Sedadi (Kab. Grobogan)
4. Rehabilitasi DI. Pemali (27.482 ha)
5. Rehab DI Colo
6. Rehab Drainase Sistem DI. Kalibawang
7. Rehab DI Kedung Puteri (Purworejo)
8. Rehab DI Grogek /Sungapan (Pemalang 7.064 ha)
9. Pembangunan tampungan air suplesi DI Dumpil (Grobogan)

Jatim:

1. Rehab D.I. Pacal (Kab. Bojonegoro)
2. Rehab D.I. Prijetan (Kab. Lamongan)
3. Rehab D.I. Gondang (Kab. Lamongan)
4. Pembangunan Lumbung Air Sukodono (Kab. Gresik)
5. Rehab D.I. Delta Brantas (Kab. Sidoarjo)
6. Rehab D.I. Baru (Kab. Banyuwangi, 15.910 Ha)
7. Rehab D.I. Sampean Baru (Kab. Bondowoso)
8. Rehab Bendung Sungkur
9. Rehabilitasi DI Sampean Lama (Kab. Situbondo)

Jabar:

1. Pembangunan D.I. Rengrang (Kab. Sumedang)
2. Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Rentang (Kab. Majalengka, Cirebon dan Indramayu)
3. Pembangunan DI. Leuwigoong (Kab. Garut)
4. Rehab D.I. Manganti (Sl. Lakkok Selatan 4600 Ha)
5. Rehab DI Cikunten I dan II

Sulsel:

1. Pembangunan Bendung D.I. Baliase (Kab. Luwu Utara)
2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Kanan 2 dan Baliase Kiri (Kab. Luwu Utara)
3. Rehab D.I. Kaleana I,II,III (Kab. Luwu Timur)
4. Rehab D.I. Palakka (Kab. Bone)
5. Rehab D.I. Pattiro (Kab. Bone)
6. Rehab D.I. Pamukkulu (Kab. Takalar)

Sumut:

1. Pembangunan Bendung D.I. Sei Wampu (Kab. Langkat)
2. Rehab D.I. Sei Ular (Kab. Deli Serdang dan Serdang Bedagai)
3. Pembangunan Bendung DI Sittakurak (Tapanuli Tengah, 1000 ha)
4. Pembangunan Bendung DI Sidilanitano
5. Pembangunan Bendung Sei Padang

Lampung:

1. Pembangunan dan SS D.I. Jabung
2. Pembangunan SS Way Besai Kab Way Kanan (7.500 ha)

Sumbar:

1. Pembangunan D.I. Batang Sinamar (Kab. Tanah Datar)
2. Pembangunan DI Kawasan Sawah Laweh Tarusan (3.723 ha)

Kalsel:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai
2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap
3. Pembangunan DI Amandit (Kab. Hulu Sungai Selatan)

Aceh:

1. Pembangunan Bendung dan Saluran Penyambung DI. Kr.Pase (Aceh Utara, 9.000 ha)
2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan (3.028 Ha di Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur)
3. Pembangunan DI Lhok Guci (Aceh Barat 1000ha)

Sumsel:

1. Pembangunan D.I. Lematang (Kota Pagar Alam)
2. Pembangunan D.I. Komerling (Kab. OKU Timur, 3.112 ha)
3. Review Desain, AMDAL, LARAP sistem interkoneksi DI Bumi Agung dan Tulung Mas (7.299 ha)

Banten:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pamarayan Utara

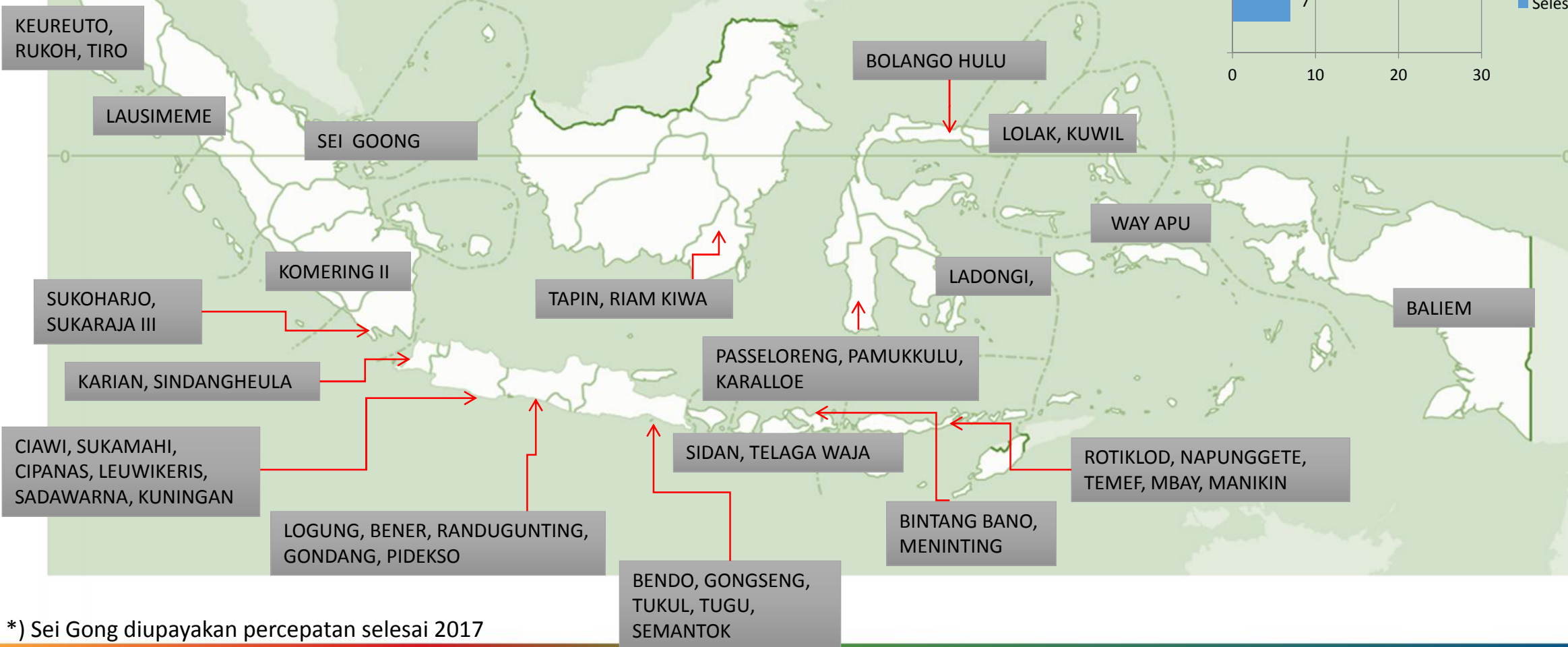
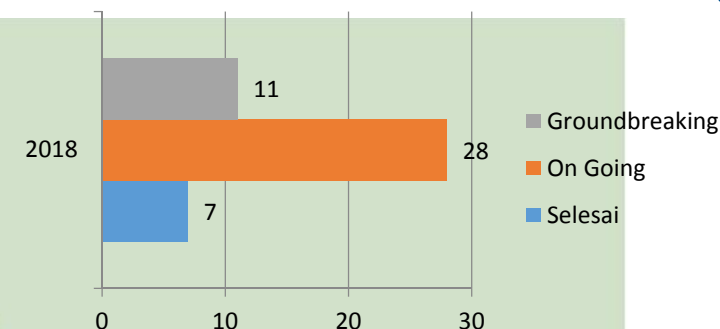
Sulteng:

1. Rehab D.I. Gumbasa Kab.Sigi
2. Rehab D.I. Sausu Atas Kab.Parigi Moutong

RENCANA PEMBANGUNAN WADUK TAHUN 2018

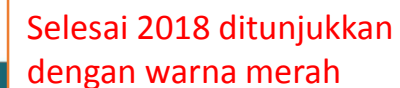
Selesai 2017: Marangkayu,
Raknamo, Tanju, Mila

Selesai 2018: Kuningan, Tugu, Logung,
Gondang, Rotiklod, Bintang Bano, Sei Gong*



*) Sei Gong diupayakan percepatan selesai 2017

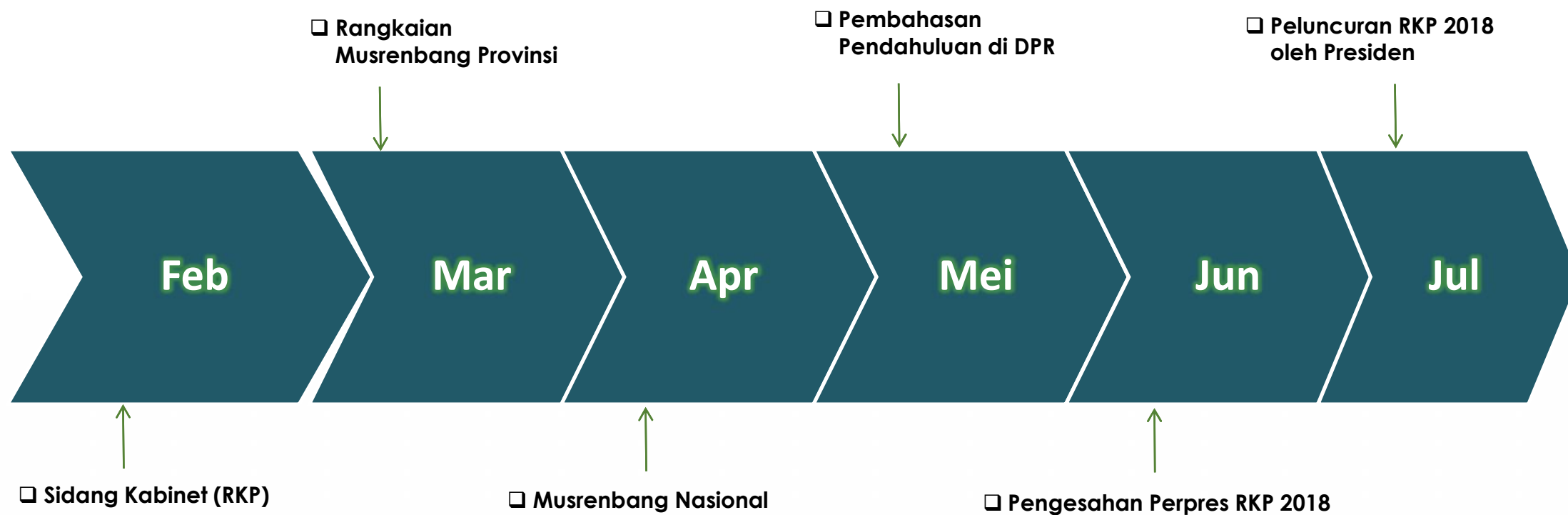
Banjir



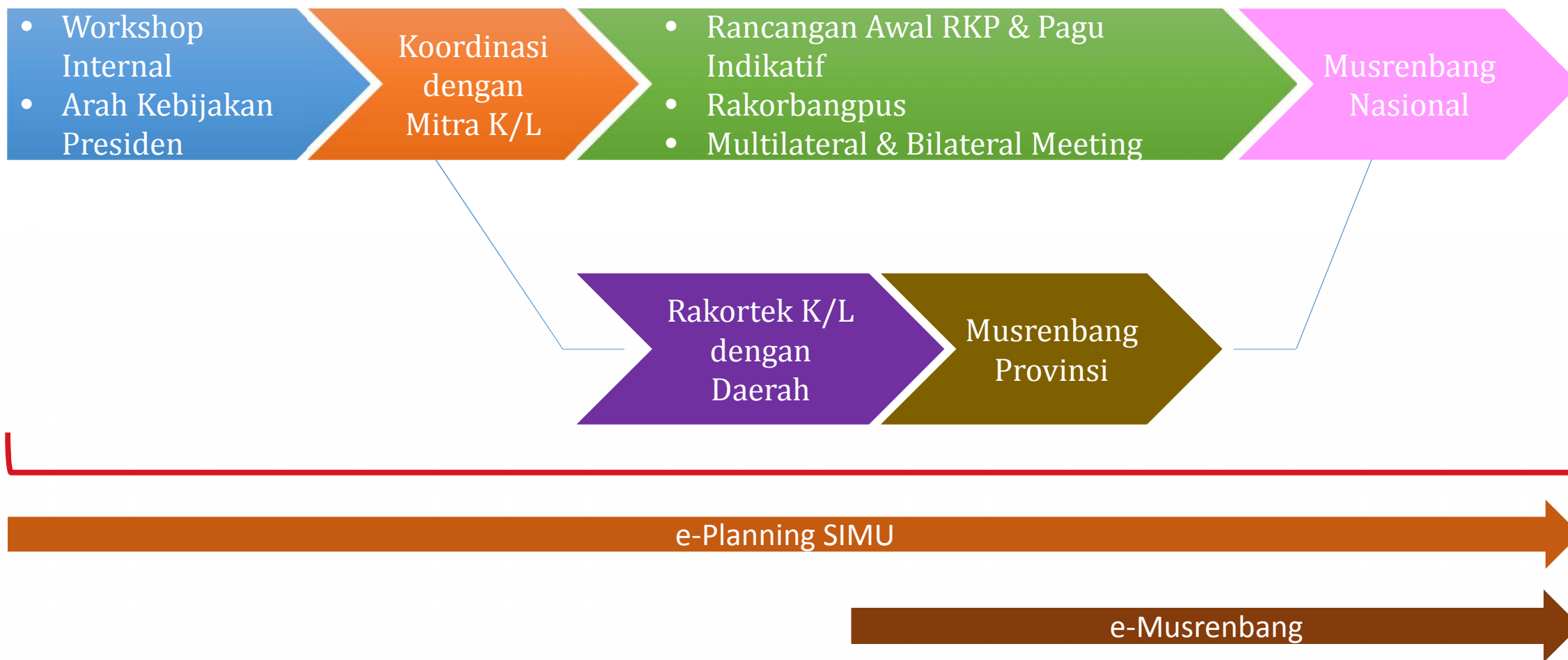
6

Penutup

Tahapan Penyusunan RKP 2018 (Desember 2016 – Juli 2017)



PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 SAMPAI BULAN APRIL





Musrenbang sebagai Forum Penyelarasan RKP dan RKPD

Koridor Money Follow Program dan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial

10 PRIORITAS NASIONAL

- Sasaran Prioritas
- Indikator Sasaran

- Kewenangan:
- Pusat (K/L)
 - Provinsi
 - Kab/Kota

- Pendanaan:
- K/L
 - DAK (Penugasan)
 - PNM
 - KPBU
 - APBD

Musrenbang Provinsi

1. Prioritas Daerah dan Nasional
2. Sasaran Daerah dan Nasional
3. Kewenangan
 - Pusat
 - **Provinsi**
4. Pendanaan
 - **APBD**
 - **DAK Penugasan**
 - K/L

Musrenbang Kab/Kota

1. Prioritas Daerah
2. Sasaran Daerah
3. Kewenangan
 - Pusat
 - Provinsi
 - **Kab/Kota**
4. Pendanaan
 - **APBD**
 - **DAK**
 - K/L

*Readiness
criteria*

Musrenbang Nasional

1. Prioritas Nasional
2. Sasaran Nasional
3. Kewenangan
 - **Pusat**
 - **Provinsi**
4. Pendanaan
 - **K/L**
 - **DAK**
 - **BUMN**
 - **KPBU**
 - **PINA**

Penutup

- ❑ **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional** adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam **pencapaian sasaran** dan **prioritas pembangunan nasional**, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan**.
- ❑ Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi DIY perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan:
 - ❑ Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)
 - ❑ Perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
- ❑ Seluruh hasil kesepakatan pelaksanaan rangkaian Musrenbang Provinsi DIY agar dapat digunakan dalam pembahasan Rakortek Pusat dan Daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018.

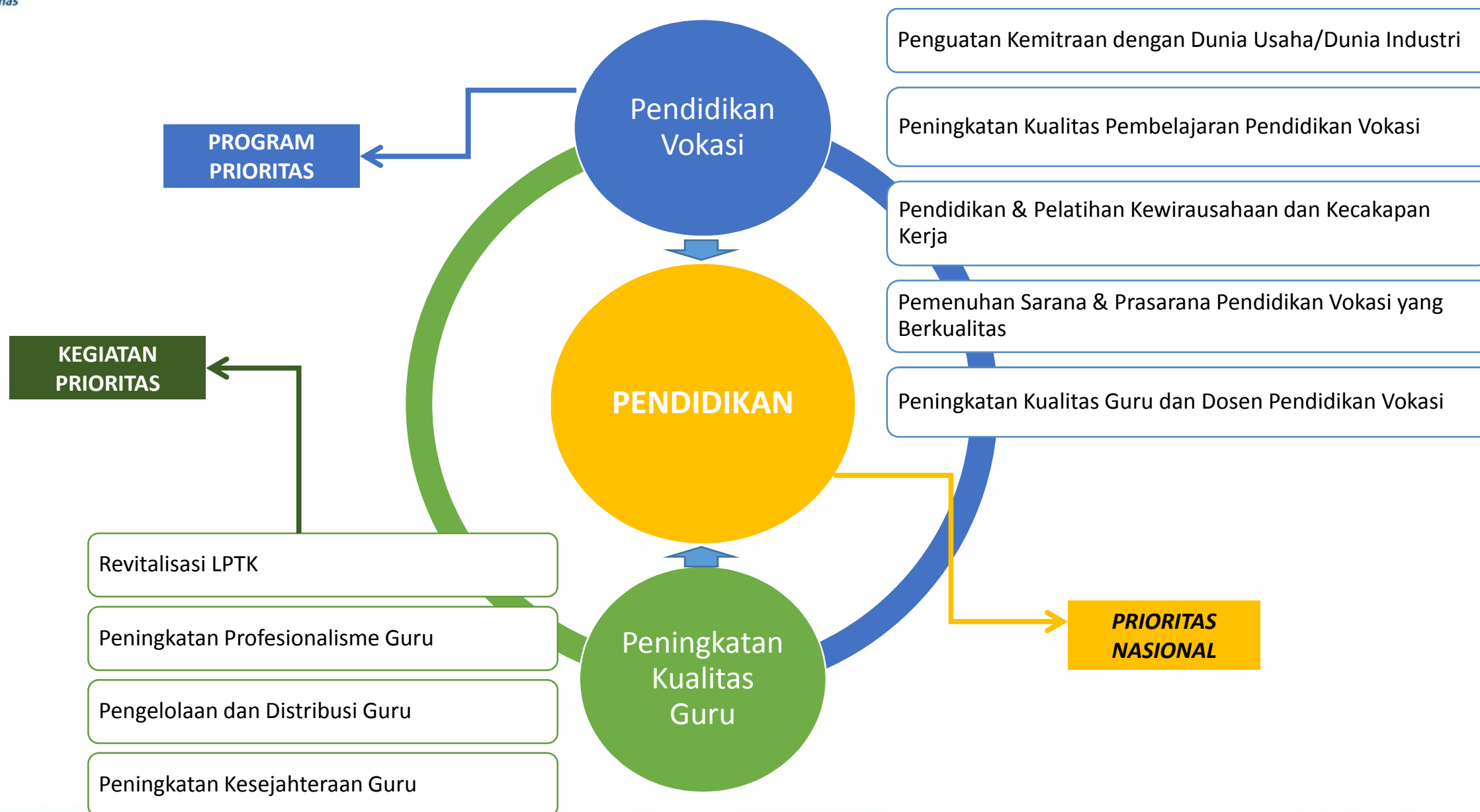
7

Lampiran



1. Prioritas Nasional Pendidikan

Prioritas Nasional Pendidikan



Rancangan Program Prioritas Pendidikan Vokasi

PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta	Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi	Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi
Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta	Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi		Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	
Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi	Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi			
Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi				

Rancangan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Revitalisasi LPTK	Peningkatan Profesionalisme Guru	Pengelolaan dan Distribusi Guru	Peningkatan Kesejahteraan Guru
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK	Proyek Peningkatan Kompetensi Guru	Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru	Proyek Penyediaan Tunjangan Guru
	Proyek Penilaian Kinerja Guru	Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T	Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru
	Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru		
	Proyek Sertifikasi Guru		



2. PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

Prioritas Nasional Kesehatan



Rancangan Program Prioritas: Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pemenuhan JKN/KIS
		Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas
		Pemenuhan SDM kesehatan
		Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS	Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
Pengendalian Malaria		
Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i>		

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF DAN PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”		
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Peningkatan lingkungan sehat	Peningkatan pemahaman hidup sehat	Peningkatan konsumsi pangan sehat
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat	Kampanye Hidup Sehat	Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat



Kementerian PPN/
Bappenas

3. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PN Perumahan dan Permukiman



Rancangan Program Prioritas: Penyediaan Perumahan Layak

PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK

Kegiatan Prioritas

**Penciptaan Iklim Kondusif
Penyediaan Rumah MBR**

Kegiatan Prioritas

**Penataan Penyediaan
dan Peningkatan
Kualitas Perumahan
MBR**

Kegiatan Prioritas

**Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan MBR**

Kegiatan Prioritas

**Peningkatan Kualitas dan
Penyediaan Infrastruktur
Dasar Permukiman**

Proyek Prioritas

Reformasi administrasi
pertanahan dan perizinan
pembangunan perumahan

Peningkatan pembinaan dan
pengawasan standar
bangunan gedung

Pengembangan sistem
informasi bantuan
perumahan

Proyek Prioritas

Penyediaan rumah susun
beserta PSU

Penyediaan rumah khusus
beserta PSU

Fasilitasi penyediaan
rumah swadaya beserta
PSU

Proyek Prioritas

Fasilitasi pembiayaan
perumahan sisi *demand*

Fasilitasi pembiayaan
perumahan sisi *supply*

Proyek Prioritas

Perencanaan perumahan dan
kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur
kawasan permukiman

Keterangan:

PSU: Prasarana Sarana Utilitas

MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rancangan Program Prioritas: Air Bersih dan Sanitasi

PROGRAM PRIORITAS AIR BERSIH DAN SANITASI

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Proyek Prioritas

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang terintegrasi terutama di daerah dengan akses rendah

Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Proyek Prioritas

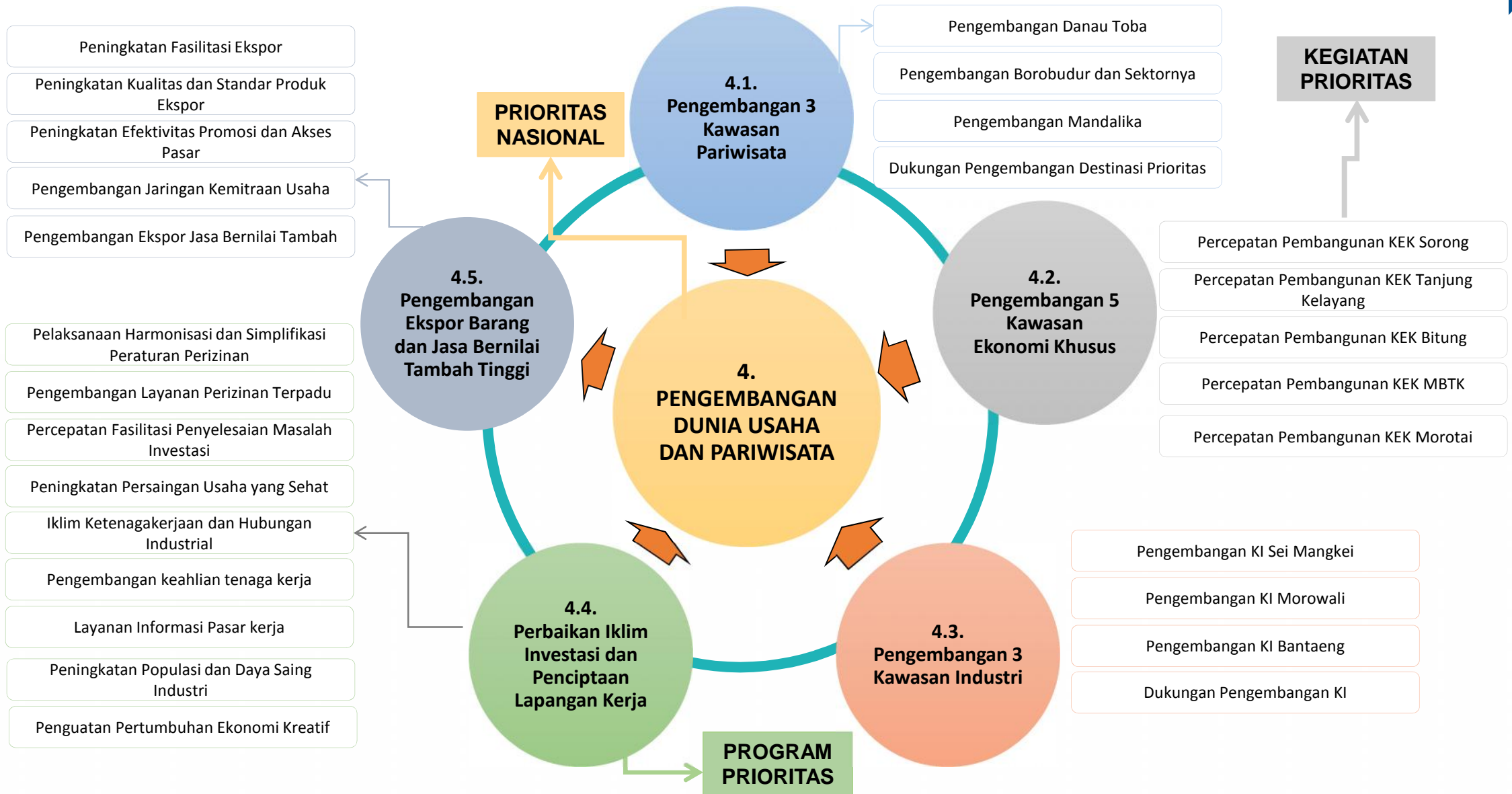
Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air domestik di 15 DAS prioritas

Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air di kota-kota besar dan metropolitan



4. PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata



Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Danau Toba	Pengembangan Borobudur dan Sekturnya	Pengembangan Mandalika	Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang
Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Pembentukan Kelembagaan Destinasi
Pembentukan Kelembagaan Destinasi	Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang	Pembentukan Kelembagaan Destinasi	Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata
Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata	Pembentukan Kelembagaan Destinasi	Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata	Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)
Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)	Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata	Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)	Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)
Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)	Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)	Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)	Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata
Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata	Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)	Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata	Penyediaan Regulasi dan Fasilitas untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata
Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)	Penyediaan Statistik Pariwisata Nasional
Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan	Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan	Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan	
Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib	Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib	Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib	
Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata	Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata	Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata	

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

<div>KEGIATAN PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Sorong</div>	<div>KEGIATAN PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang</div>	<div>KEGIATAN PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Bitung</div>
<div>PROYEK PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Sorong</div>	<div>PROYEK PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang</div>	<div>PROYEK PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Bitung</div>
<div>KEGIATAN PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK MBTK</div>	<div>KEGIATAN PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Morotai</div>	
<div>PROYEK PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK MBTK</div>	<div>PROYEK PRIORITAS</div> <div>Percepatan Pembangunan KEK Morotai</div>	

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Industri

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI (KI)			
KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan KI Sei Mangkei	Pengembangan KI Morowali	Pengembangan KI Bantaeng	Dukungan Pengembangan Kawasan Industri
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI
Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
Pembebasan Lahan	Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI	Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI	Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI
Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI
Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK	
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK	Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI	Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI	
Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI		Penyediaan Insentif KI	

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (1)

PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

KEGIATAN PRIORITAS

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan peringkat EoDB

Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perizinan nasional

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah

PROYEK PRIORITAS

Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis

Penyelesaian pengaduan masalah investasi

Perkuatan Data dan Informasi Investasi

PROYEK PRIORITAS

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat

Penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (2)

PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri	Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif	Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	Layanan Informasi Pasar Kerja
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penguatan ekosistem dan daya tahan industri	Penguatan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif	Percepatan Penyempurnaan UU Ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)	Pembangunan bengkel pelatihan bersama (<i>workplace</i>) di 20 Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Pasar Kerja di Kawasan Industri
Peningkatan desain, standardisasi mutu, kualitas produk	Peningkatan Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan	Kemitraan Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial	Skema Dana Pengembangan Pelatihan	
Penumbuhan populasi industri	Penguatan Rantai Nilai dan Peningkatan Akses Pasar	Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		
Pembaharuan permesinan industri	Dukungan Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			
Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri				

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (1)

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Fasilitas Ekspor	Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor	Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Publikasi dan sosialisasi mengenai perundingan perdagangan internasional	Peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi	Peningkatan citra produk Indonesia (branding)
Pengembangan sistem fasilitas pembiayaan perdagangan	Penyediaan sistem informasi ketentuan standard di negara mitra	Penyediaan informasi dan analisa pasar ekspor
Kerjasama pengembangan ekspor	Peningkatan infrastruktur mutu	Promosi dagang dalam dan luar negeri
Fasilitasi kebijakan perdagangan		Peningkatan akses pasar

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (2)

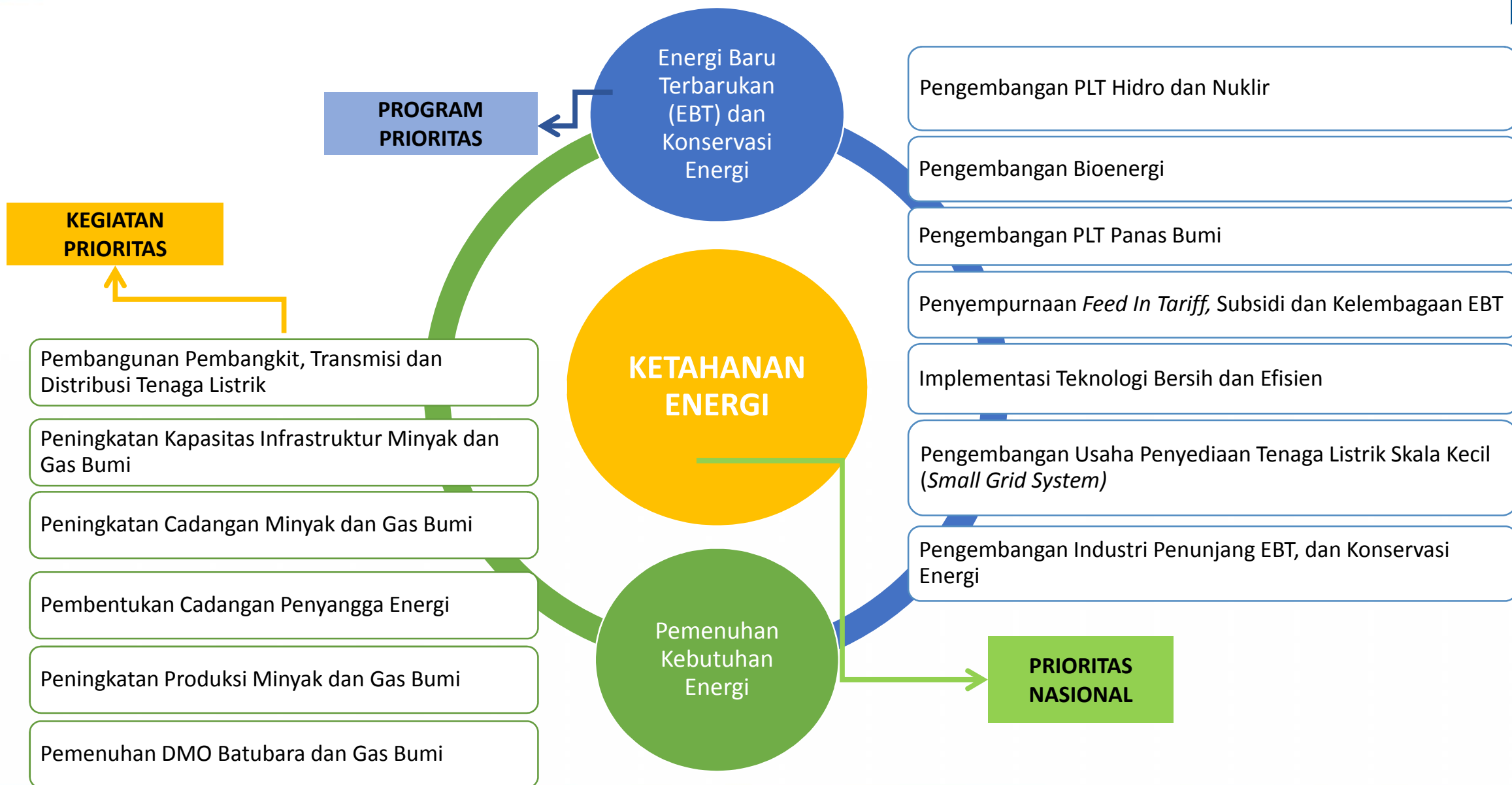
PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha	Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Fasilitasi kemitraan rantai nilai/pasok	Pendampingan pasar jasa
	Kebijakan pendukung pengembangan jasa



5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

KETAHANAN ENERGI



Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (1/2)

PROGRAM PRIORITAS ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN KONSERVASI ENERGI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir	Pengembangan PLT Panas Bumi	Pengembangan Bioenergi	Penyempurnaan <i>Feed-In-Tariff</i> , Subsidi dan Kelembagaan EBT	Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (<i>Small Grid System</i>)	Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan PLT berbasis Hidro	Peningkatan Capacity Building Panas Bumi	Pembangunan Infrastruktur Bioenergi	Penyempurnaan Regulasi <i>Feed-in-Tariff</i> EBT	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas	Regulasi dan Mekanisme Penetapan Pembangunan <i>Small Grid System</i> secara Komprehensif	Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri EBT dan Konservasi Energi Dalam Negeri
Pengembangan PLT Nuklir/Thorium	Pembangunan Research Center Panas Bumi	Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE)	Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Efisiensi Energi	Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil	Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT
	Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumi		Pembentukan Badan Usaha EBT	Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung		Riset Teknologi EBT dan Konservasi Energi Bagi Industri Nasional
	Pembangunan PLTP					

Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (2/2)

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN ENERGI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Pembentukan Cadangan Penyangga Energi	Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi	Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	Eksplorasi minyak dan gas bumi	Pembangunan Cadangan Penyangga Energi	Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi	Penyediaan Alokasi Gas Domestik
Penetapan harga energi listrik dan penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran	Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM	Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional		Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Non Konvensional	Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu	Pembangunan Tangki Penjualan LPG			Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional	Tata Kelola dan Penetapan Zonasi Penyediaan Batubara untuk PLTU dan Industri
	Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelavan			Penawaran WK Migas Non Konvensional	
	Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan			Peningkatan Daya Tarik Investasi Minyak dan Gas Bumi	
	Pembangunan LCNG/LNG			Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Konvensional	
	Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal			Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas	
	Fasilitasi dan monitoring Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan)			Penyempurnaan Regulasi Minyak dan Gas Bumi	
	Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran				
	Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi				
	Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa				



6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

PN Ketahanan Pangan

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan irigasi

Pengelolaan Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampungan

Perluasan Lahan Pertanian

Alat dan Mesin Pertanian

Sarana Pasca Panen

Sarana dan Prasarana pelatihan Pertanian

Sarana dan Prasarana Distribusi Pangan dan Pertanian di 34 Provinsi

Sarana dan Prasarana Peningkatan Konsumsi pangan di 34 Provinsi

Peningkatan
Produksi Pangan

Produksi Padi 79,3 juta ton

Produksi Jagung 23,4 juta ton

Produksi Kedelai 2,3 juta ton

Produksi Gula 3,2 juta ton

Produksi Daging Sapi 710 ribu ton

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, & Bawang Merah 1,3 juta ton

Produksi Jeruk 1,8 juta ton dan Buah Lainnya

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4,1 juta ton

**KETAHANAN
PANGAN**

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian
(termasuk
irigasi)

PRIORITAS NASIONAL

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (1/2)

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Produksi Padi 79,3 juta ton	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Produksi Kedelai 2,3 juta ton*	Produksi Gula 3,2 juta ton
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi	Pengembangan Sistem perbenihan jagung di 10 provinsi	Pengembangan Sistem perbenihan kedelai di 10 provinsi	Pengembangan benih tebu
Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi	Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi	Pengembangan teknologi budidaya kedelai di 10 provinsi	Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra
Bantuan benih pada padi jajar legowo di 15 provinsi	Bantuan benih pada jagung hibrida di 10 provinsi	Bantuan benih kedelai di 10 provinsi	Pengembangan dan penelitian teknologi produksi tebu
Penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan padi di 15 provinsi	Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi	Bantuan puso untuk kedelai di 10 provinsi	Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi	Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi	Subsidi pupuk untuk kedelai di 10 provinsi	
Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi	Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi	Penguatan penyuluhan kedelai di 10 provinsi	
Penguatan statistik padi/beras di 15 provinsi			
Penyediaan fasilitas dan pelatihan pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)			

Ket : * Kedelai merupakan komoditas pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di dalam RPJMN 2015-2019, tetapi disarankan untuk tidak diprioritaskan dalam alokasi pendanaan dikarenakan faktor iklim.

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (2/2)

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

KEGIATAN PRIORITAS

**Produksi Daging Sapi
710 ribu ton**

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Produksi Benih Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penyediaan Bibit Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Percepatan peningkatan populasi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong

Asuransi Sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Perluasan Kawasan Aneka Cabai di 9 provinsi dan bawang di 4 provinsi

Penyediaan Benih Bawang Merah dan Benih Cabai, diutamakan varietas lokal

Pengendalian OPT Hortikultura

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan Buah lainnya

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan benih buah di 8 provinsi

Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan buah lainnya di 8 provinsi

Pengembangan teknologi varietas unggul lokal yang komersial

Pengendalian OPT Buah

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan produksi perikanan tangkap di 11 WPP

Peningkatan produksi perikanan budidaya

Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan

Industrialisasi perikanan

Peningkatan Produksi garam

Konservasi Pesisir dan Laut (habitat ikan)

Rancangan Program Prioritas : Sarana dan Prasarana Pertanian (1/2)

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya	Perluasan lahan pertanian	Alat dan mesin pertanian
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan: berat-sedang-ringan	Pembangunan bendungan	Verifikasi luas sawah baku	Mengkaji kebutuhan dan skema pendanaan kredit untuk pengadaan Alsintan
Rehabilitasi bendung irigasi : berat-sedang-ringan	Pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya.	Penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RTDR yang memasukkan LP2B	Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen padi
Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan		Optimasi lahan	Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen jagung
Pembangunan bendung irigasi		Cetak sawah	Penyaluran dan pemanfaatan bantuan Alsin Budidaya Tebu di Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel
Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif.			

Rancangan Program Prioritas: Sarana dan Prasarana Pertanian (2/2)

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana pasca panen

PROYEK PRIORITAS

Revitalisasi penggilingan padi

Penyaluran alat pascapanen perkebunan

Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

Pembangunan Bangsal Pascapanen dan teknik pengemasan

Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan perikanan

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi

PROYEK PRIORITAS

Resi gudang

Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan

Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak

Revitalisasi pasar

Penguatan karantina pangan dan pertanian

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan keamanan dan mutu pangan

Penguatan kualitas konsumsi pangan

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan



7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional 7: Penanggulangan Kemiskinan



Rancangan Program Prioritas (1/3)

PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan	Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Penyaluran bantuan sosial melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan		
Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi	Monitoring dan evaluasi terpadu JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
	Percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial melalui advokasi, sosialisasi, dan inovasi pendaftaran dan pembayaran iuran	Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di 98 kota dan 188 kabupaten	Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai	Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA
		Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastr)	Penyaluran Bantuan PKH Secara Reguler	Subsidi elpiji 3 kg
			Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	

Rancangan Program Prioritas (2/3)

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar	Penyediaan Layanan Dasar
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Pendidikan anak berkebutuhan khusus	Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya
Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman	Advokasi dan edukasi perlindungan anak berkebutuhan khusus	Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Pemantapan bagi organisasi dan pekerja sosial	Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang disabilitas	Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
	Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan	Pemberian Pelayanan <i>Home Care</i> bagi Lanjut Usia	Bantuan Pembiayaan KPR Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun
			Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil



Rancangan Program Prioritas (3/3)

PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

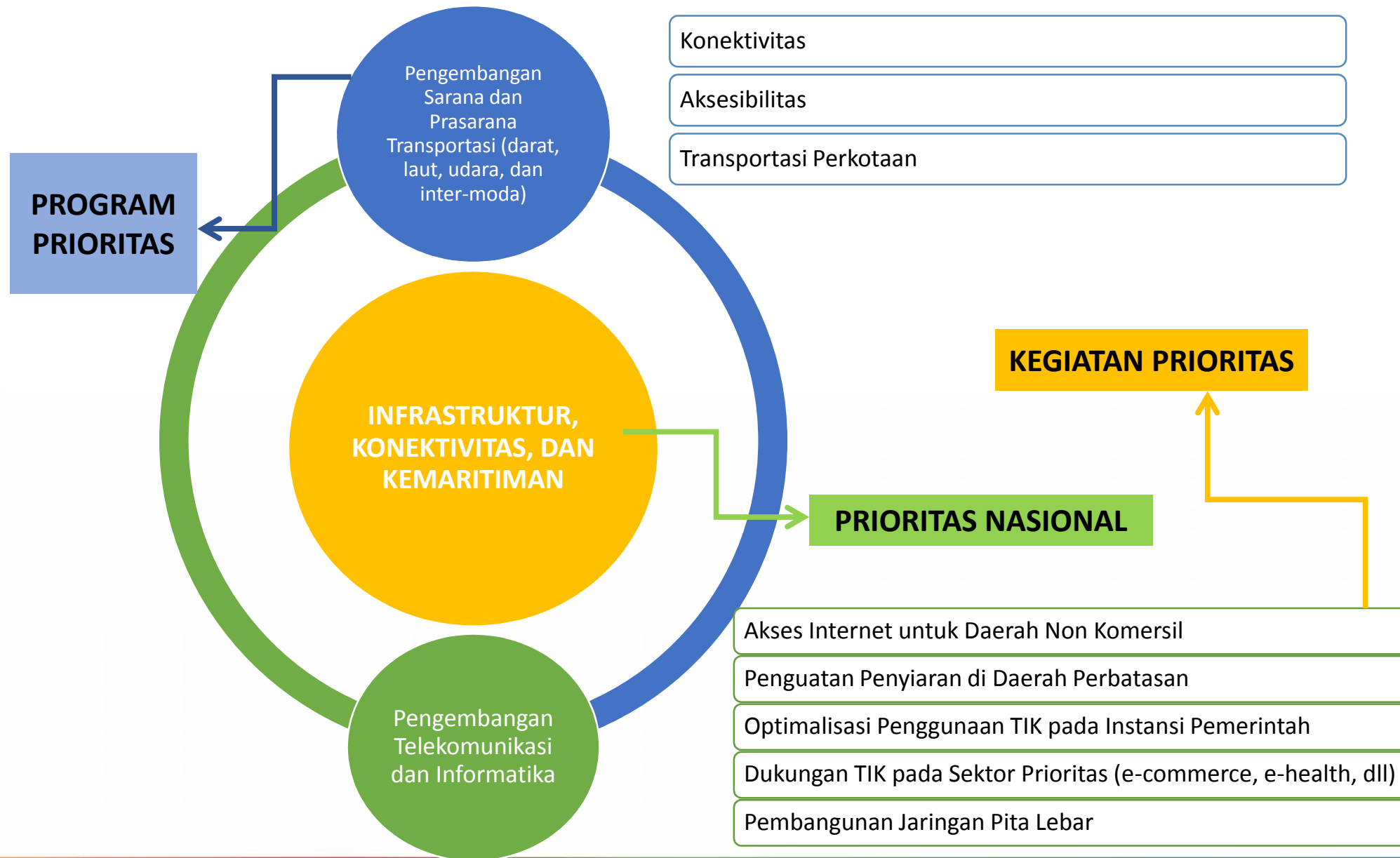
KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	Pengembangan Kewirausahaan	Perluasan Akses Pembiayaan	Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Pelatihan SDM KUMKM Berbasis Kompetensi	Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/ Sentra Usaha Mikro	Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan	Penguatan Modal KUMKM	Fasilitasi Akta Koperasi	Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi
Pelatihan, Pendampingan, dan Pemagangan	Perluasan Akses Pemasaran	Pengembangan Inkubator Bisnis	Peningkatan Akses UMKM untuk Mendapat Kredit	Registrasi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat
Pengembangan Layanan Usaha	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM		Penyediaan Modal Awal Usaha		Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha
	Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan				Peningkatan Kapasitas Koperasi



Kementerian PPN/
Bappenas

8. PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman



PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

Program Prioritas:

Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda)

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Konektivitas	Aksesibilitas	Transportasi Perkotaan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan
Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan	Pembangunan Fly Over/Under Pass Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal	Penyediaan Armada BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan
Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal	Pengembangan Kota dengan Sistem BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan
Pembangunan/Pembaharuan Kapal Niaga Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penyediaan Armada Perintis Mendukung Daerah Tertinggal	Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan
Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda	Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Perintis Mendukung Daerah Tertinggal	
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik		
Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik		
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik		
Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik		

PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

85

Program Prioritas:

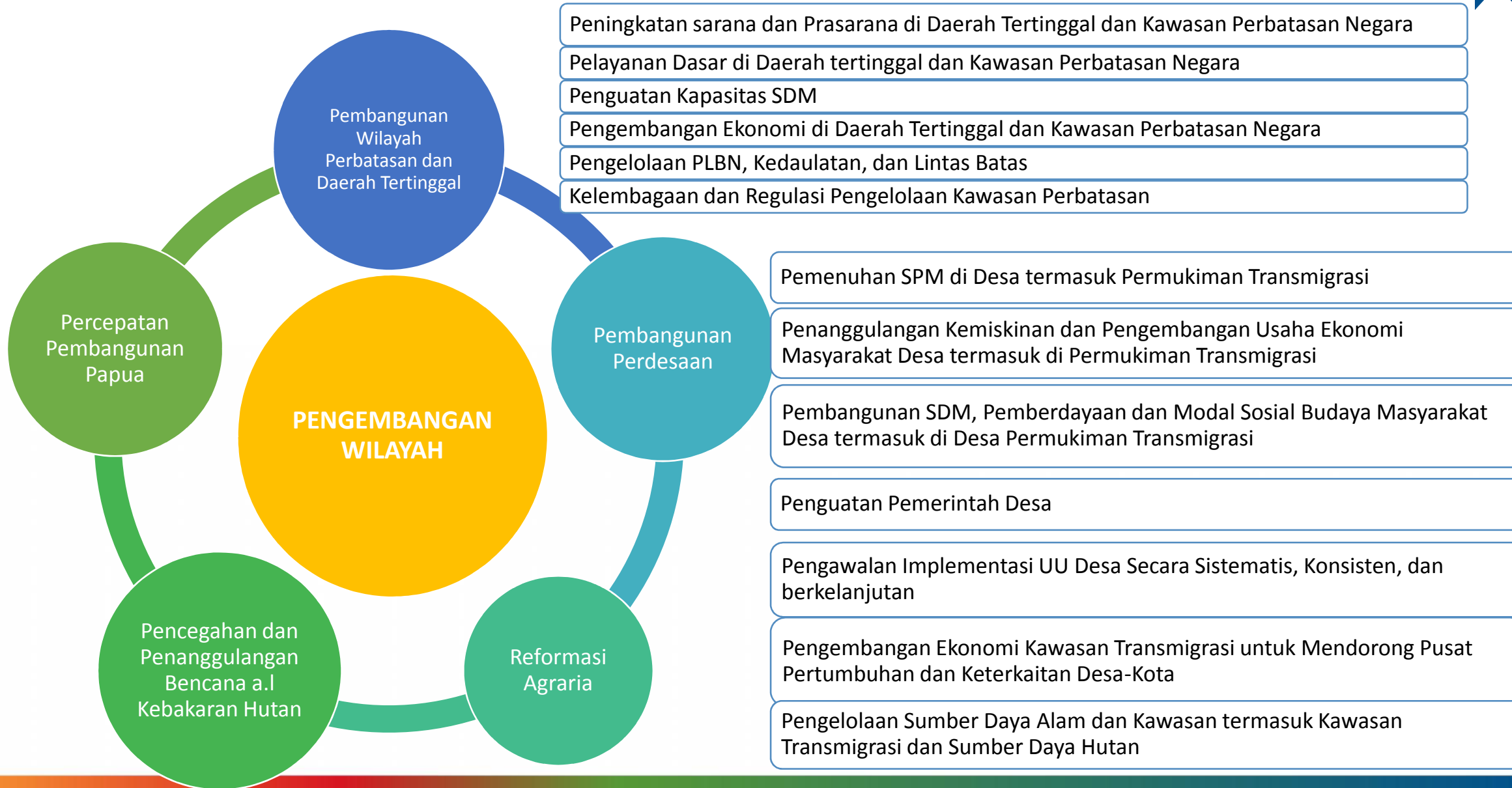
Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil	Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan	Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah	Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, E-health, Dll)	Pembangunan Jaringan Pita Lebar
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan BTS Di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi	Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar	Implementasi Masterplan, Arsitektur E-government Nasional, Dan Piloting Datacenter Nasional	Layanan Pemberian Domain .Id Gratis	Palapa Ring (Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional)
Jasa Akses Internet Broadband Di Wilayah Layanan Telekomunikasi	Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar	Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini	Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding	Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Mobile Broadband
Desa Broadband Terpadu	Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik		Dukungan TIK Dalam Layanan Kesehatan	
	Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Televisi Publik		Jaringan Pendidikan Nasional Dan E-education	
	Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan			
	Pelaksanaan Siaran Digital Televisi Publik			

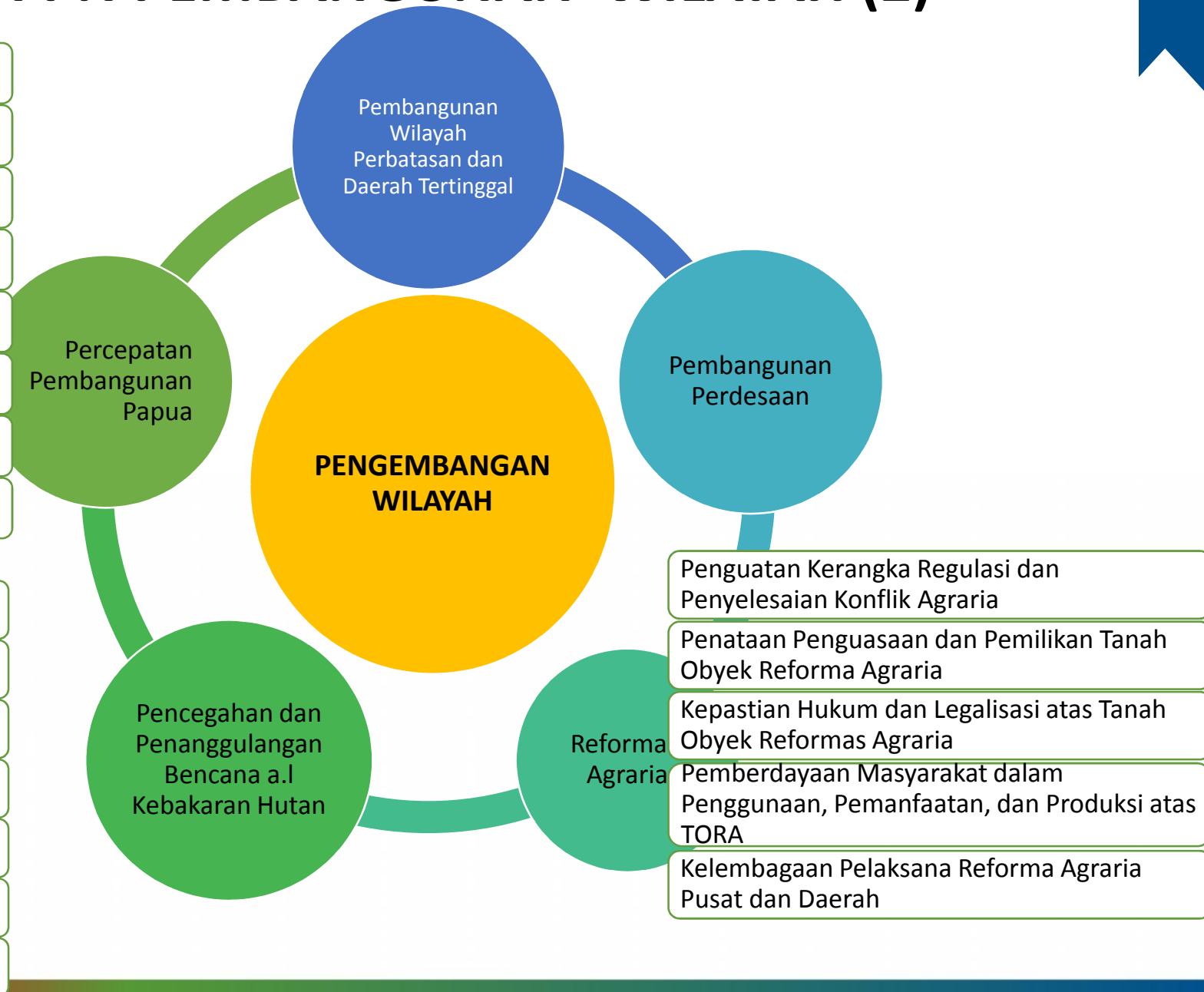


9. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

PN Pembangunan Wilayah (1)



ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (2)



Rancangan Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Penguatan Pemerintahan Desa	Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan	Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)	Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa	Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa	Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Penataan Kawasan Sentra Nelayan	Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan
Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan terutama UMKM	Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi	Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa		Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah		Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa		Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama	Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi	Penguatan Permodalan dan Akses Pasar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa		Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa			Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

Rancangan Program Prioritas: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pelayanan Dasar Kebencanaan	Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi	Sosialisasi dan Simulasi Bencana Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana	Penyediaan Sistem Peringatan dini Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan	Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Penyediaan layanan data dan informasi bencana	Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana	Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Rehabilitasi DAS	Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana



Rancangan Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA

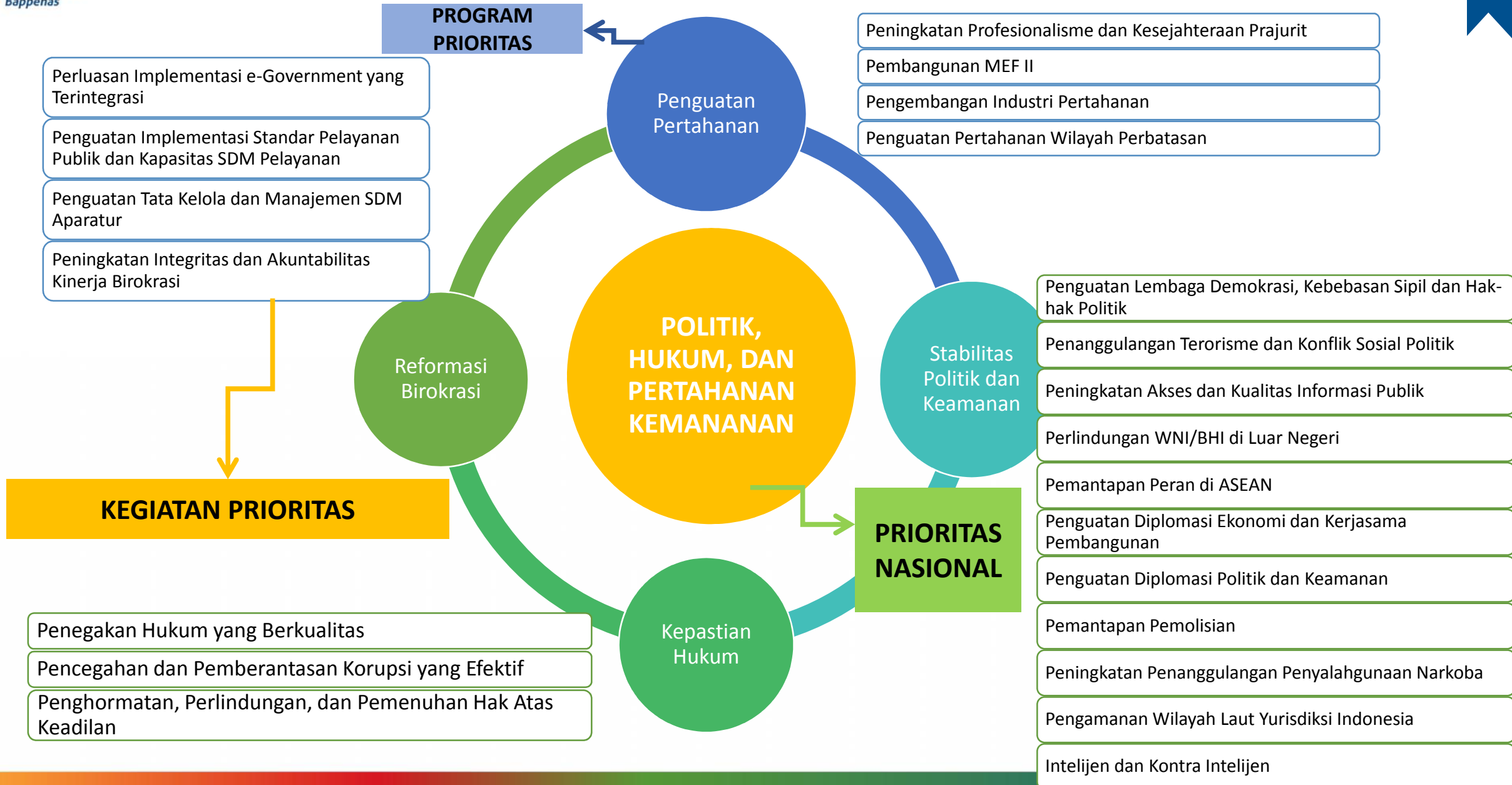
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
Proyek Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Nasional
Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria	Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria	Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas Reforma Agraria di Kab/Kota	Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA	Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA
Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria	Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan	Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha	Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat
Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis	Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lainnya	Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin	Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA	Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah
Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat		Publikasi tata batas kawasan hutan		Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria	Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan	Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi		Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum
Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis	Penyelesaian Pelepasan Kasawan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria termasuk Tata Batas	Legalisasi untuk tanah transmigrasi		
		Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat		



Kementerian PPN/
Bappenas

10. PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan



Rancangan Program Prioritas: Penguatan Pertahanan

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit	Pembangunan MEF II	Pengembangan Industri Pertahanan	Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Prajurit	Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra	Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan	Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan
Pemantapan latihan dan kesiapsiagaan operasi militer selain perang	Pertahanan Teritorial Strategis		
	Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim		
	Pertahanan Ruang Udara Nasional		

Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1)

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik	Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Pemantapan Peran di ASEAN
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pendidikan Pemilih	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia
Pemutakhiran Data Pemilih	Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog Kewaspadanaan Nasional	Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers		Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA
Pengawasan Pemilu Partisipatif				
Bantuan Keuangan Partai Politik	Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme	Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo		

Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2)

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan	Pemantapan Pemolisian	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia	Intelijen dan Kontra Intelijen
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular	Penguatan Perundingan Perbatasan	Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Ketertiban	Pemberantasan Narkoba	Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan	Deteksi Dini Keamanan Nasional
Penguatan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin	Implementasi <i>Document of Conduct</i> dan kemajuan substantif perumusan <i>Code of Conduct</i>	Penanganan Kejahatan dan Gangguan Ketertiban	Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba		Pengamanan Data dan Informasi Negara
Pembentukan <i>Single Agency</i> KSST	Pencapaian Visi 4000 <i>Peacekeepers</i>	Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat			
Penguatan Diplomasi Maritim (Ekonomi)	Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB				
Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif	Penguatan Diplomasi Maritim (Politik - Keamanan)				

Rancangan Program Prioritas: Kepastian Hukum

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM

Kegiatan Prioritas

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Proyek Prioritas

Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penuntutan

Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI)

Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha

Peningkatan kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA

Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Prioritas

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Proyek Prioritas

Kolaborasi Pencegahan Korupsi

Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pusat

Kegiatan Prioritas

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Proyek Prioritas

Penguatan SPPT-PKKTP dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum

Rancangan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Perluasan Implementasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi	Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
<p>Penerapan <i>e-Government</i> pada instansi pemerintah pada 705 K/L/D (antara lain: <i>e-Office</i>, <i>e-Performance</i>, <i>e-Budgeting</i>, <i>e-Management-Kepegawaian</i>, <i>Complain Handling Mechanism (LAPOR)</i>)</p> <p>Penerapan <i>e-Services</i> pada 50% dari unit pelayanan publik yang ada</p> <p>Desain perbaikan infrastruktur dan penerapan <i>e-Arsip</i> di 163 K/L</p> <p>Pengintegrasian <i>e-Planning</i>, <i>e-Budgeting</i>, <i>e-Reporting</i> antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan-RB</p> <p>Penguatan Sistem <i>Monev-Next Generation</i> online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L</p>	<p>Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik</p> <p>Penerapan SPM pada seluruh unit pelayanan publik (100%)</p> <p>Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat</p> <p>Rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik</p>	<p>Restrukturisasi kelembagaan STIA-LAN menjadi <i>National Institute for State Apparatus</i></p> <p>Penyusunan <i>Human Capital Development Plan</i>-Pemenuhan kebutuhan Diklat minimal 40 jam untuk mendukung kompetensi inti ASN</p> <p><i>Grand Design Public Administration</i></p> <p>Penataan kelembagaan LPNK</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian / ASN</p> <p>Pengembangan <i>talent pool</i> ASN nasional</p> <p>Penerapan regulasi teknis manajemen ASN di seluruh K/L/D</p> <p>Pelaksanaan diklat RLA</p> <p>Pengawasan pelanggaran netralitas dan sistem merit ASN</p> <p>Penguatan Inovasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah</p>	<p>Penerapan Sistem Integritas Aparatur Negara di seluruh K/L (100%)</p> <p>Beasiswa dan diklat untuk 10.000 orang di Bidang Pengawasan/Auditor</p> <p>Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE</p> <p>Kebijakan untuk perbaikan seluruh kinerja K/L</p> <p>Peningkatan Efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa</p>

Terima Kasih



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**SAMBUTAN
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
PADA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI D.I YOGYAKARTA 2018**

Yogyakarta, 15 Maret 2017

***Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan,
Yang terhormat Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta,
Yang terhormat Para Pejabat Eselon I yang mewakili
Menteri terkait,
Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi D.I
Yogyakarta,
Yang terhormat Para Anggota Muspida Provinsi D.I
Yogyakarta,
Yang terhormat Para Bupati dan Walikota seluruh
Provinsi D.I Yogyakarta,
Yang terhormat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi D.I Yogyakarta,***

***Yang terhormat Para Tokoh Masyarakat, Akademisi,
Wakil Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat, serta
Hadirin peserta Musrenbang RKPD Provinsi D.I
Yogyakarta yang kami muliakan.***

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.***

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta. Pertemuan seperti ini sangat penting untuk bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergi kebijakan pembangunan di dalam Provinsi D.I Yogyakarta sendiri maupun dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada kesempatan pagi hari ini, ada lima hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program*. Kedua terkait dengan kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan Tahun 2018. Ketiga mengenai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018. Keempat mengenai kebijakan penyalarsan RKPD dengan RKP Tahun 2018. Dan yang terakhir terkait dengan Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Melanjutkan dari tahun sebelumnya, pendekatan penyusunan RKP 2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program* dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, dengan memperhatikan pada: *pertama*, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. *Kedua*, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga “satuan 3” untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. *Ketiga*, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. *Keempat*, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BelanjaK/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Sebagaimana arahan Bapak Presiden dimana pertumbuhan ekonomi di Tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,1 persen, hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk mencari sumber-sumber pendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam hal ini, terdapat enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu Industri pengolahan terutama non-migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan. Namun untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, maka di tahun 2018 pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen juga membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau. Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97 persen, Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23 persen, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04

persen, Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,37 persen, Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35 persen, Kepulauan Maluku diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,18 persen, serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87 persen.

Untuk itu, peranan pemerintah menjadi sangat penting, dan beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu: *Pertama*, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata. Namun, dengan keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur.

Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan

berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Visi pemerintahan 2015-2019 yang dijabarkan dalam tujuh Misi Pembangunan dan sembilan Agenda Nawacita sebagai sasaran dan tujuan pembangunan 2015-2019 telah menetapkan berbagai Prioritas Nasional. Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional yaitu antara lain (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan,

dan Kemanan. Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sepuluh Prioritas Nasional ini harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas dan didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, pendekatan perencanaan yang dilakukan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional. Pada prinsipnya, penguatan peran pemerintah provinsi dalam proses perencanaan ditujukan untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD), serta memperkuat perencanaan spasial untuk memantau kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan.

Hal ini tentunya tertuang didalam amanat UU No.25 Tahun 2004, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk mendukung

koordinasi antarpelaku pembangunan, serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah. Serta amanat UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.

Saat ini, sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemerintah pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan amanat kedua undang-undang tersebut, maka pada tahun ini kita telah melaksanakan agenda baru yaitu Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah yang merupakan forum antara pusat dan daerah untuk menghasilkan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP. Kedepan, Forum Musrenbangnas yang akan berlangsung merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mensinkronisasikan rencana pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) membahas prioritas nasional dalam rangka menyusun Rancangan Akhir RKP.

Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan atau kebutuhan sangat banyak, maka Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun dan mengusulkan usulan rencana pembangunan yang benar-benar prioritas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Sekarang mari kita lihat sejenak arah kebijakan makro Provinsi DI. Yogyakarta. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di DIY diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DI. Yogyakarta perlu didukung oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Konstruksi, serta sektor Jasa Pendidikan dengan kontribusi total sebesar 51,84%. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan keempat sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi DIY. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi DI. Yogyakarta, tingkat kemiskinan pada tahun 2018 di proyeksikan sebesar 13,63 persen.

Adapun dalam mendukung pembangunan di Provinsi DI. Yogyakarta, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan yaitu Pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa Ruas Kr. Nongko - Legundi – Duwet untuk

meningkatkan konektivitas wilayah; pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan, embung untuk air baku, embung, situ, danau untuk menjamin kinerja layanan irigasi; serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengendalian banjir, kanal, dan pengamanan pantai untuk meningkatkan perlindungan kawasan terhadap banjir. berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta.

Saudara Menteri, Gubernur dan peserta Musrenbang yang saya hormati,

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas (atau Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (atau lintas OPD) dan lintas wilayah dapat bertindak sebagai *system integrator* dan *resource allocator* antar K/L (antar OPD) dan pemerintah daerah (atau pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan OPD dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan *money follow program* dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.

Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi DIY perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan: *pertama*, pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan); *kedua*, perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bambang P.S. Brodjonegoro

**POINTER MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PADA ACARA PEMBUKAAN MUSRENBANG RKPD
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

Yogyakarta, 15 Maret 2017

1. *Forum Musrenbang RKPD, mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana tujuan dari forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang telah disusun pemerintah daerah serta dapat sejalan dengan nawacita.*
2. *RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “RKPD” merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”.*
3. *Keberadaan dokumen RKPD haruslah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan baik selama 20 tahun maupun 5 tahunan.*
4. *Berdasarkan hasil evaluasi secara nasional terhadap realisasi penyusunan/penetapan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016, Provinsi D.I. Yogyakarta telah sepenuhnya menetapkan secara tepat waktu. Untuk prestasi ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang prestasi ini dapat dipertahankan.*
5. *Rumusan prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 sesuai dengan kekhususannya, agar diselaraskan dengan 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 untuk tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan. Penajaman pencapaian sasaran terhadap Nawa Cita harus diselaraskan dengan kewenangan dalam urusan keistimewaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: kelembagaan*

Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, bidang kebudayaan, pertanahan, yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

- 6. Prioritas perencanaan pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta harus diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta terutama terkait dengan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan multidimensi. Sehingga diharapkan terjadi penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, mentalitas dan pendidikan, peningkatan produktivitas pertanian, dan pendapatan daerah.*
- 7. Selain dari pada itu, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta, antara lain:*
 - a) Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.*
 - b) Pemerataan dan perluasan pendidikan.*
 - c) Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat.*
 - d) Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.*
 - e) Peningkatan daya saing pariwisata.*
 - f) Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.*
 - g) Peningkatan infrastruktur dan tata ruang.*
- 8. Terdapat beberapa Target Makro dalam RPJMN 2015-2019 yang harus diperhatikan dalam pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2018, antara lain:*
 - a) Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.4%*
 - b) Target tingkat Kemiskinan sebesar 10.9 %*
 - c) Target tingkat pengangguran sebesar 3.4%*
- 9. Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari dukungan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana penyelarasan dokumen rencana pembangunan nasional dan dokumen rencana pembangunan daerah sangat penting sehingga esensi hubungan Pusat dan Daerah menjadi Tegak Lurus. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan adalah langkah kongkrit penyelarasan dimaksud.*
- 10. Sesuai dengan amanat Pasal 259 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014, bahwa sebelum dilaksanakan Musrenbang telah dilaksanakan koordinasi teknis pembangunan wilayah I tanggal 21 sampai 24 Februari 2017 di Batam, wilayah II pada tanggal 28 Februari sampai dengan 3 Maret 2017 di Makassar. Koordinasi teknis pembangunan bertujuan untuk menyelaraskan target-target pembangunan nasional dengan target pembangunan provinsi. Koordinasi teknis dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan tahunan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta pembangunan daerah tahun 2018 serta penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara*

pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan Tahun 2018.

11. Prioritas nasional (Proyek K/L) :

1) Pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir yang melakukan kemitraan Provinsi DI Yogyakarta

2) Perumahan dan Pemukiman

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala regional Prov. DI Yogyakarta

3) Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata

a) Dukungan Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dsk Tahun 2018

- Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta*
- Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Kulon Progo*
- Bandara Internasional Adi Sucipto*
- Pembangunan Jalur KA Jogja – Solo*

b) Dukungan Infrastruktur Sumber Daya Air Terhadap Kawasan Pariwisata Tahun 2018

- BOROBUDUR, DAN SEKITAR Saluran Pengalih Lahar Kali Putih Sabo Dam Merapi Kab. Sleman dan Magelang*

4) Prioritas Nasional Ketahanan Energi

Capaian Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 2016 (87.61)

5) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

Fokus Lokasi : Daerah Irigasi yang Memerlukan Pembangunan Jaringan Tersier (2018) DIY (1.100 Ha)

6) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tahun 2018 Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebonagung (SPAB Kertamantul)

7) Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM Provinsi DI Yogyakarta (Gunung Kidul Bantul dan Kulonprogo)

8) Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman

Kegiatan Antar Moda Sumatera dan Jawa, Pembangunan Jalur KA Menuju Bandara Kulon Progo (DED, AMDAL))

12. Di masa transisi pasca Pemilukada dan implikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah antara lain:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara*

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- b) Bagi daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2017, penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih;*
 - c) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2018. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.*
- 13. Pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RKPD Tahun 2018 selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018. Selain itu juga mengawal konsistensi baik penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2018 mendatang, maupun dalam pelaksanaannya.*
- 14. Beberapa Isu komponen Kementerian Dalam Negeri yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi DIY:*

DITJEN	URAIAN ISU STRATEGIS
POLPUM	1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah b. Menyebarnya ideologi/faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila c. Meningkatnya radikalisme d. Intoleransi antar agama e. Sparatisme dan terorisme f. Konflik SARA g. Tergerusnya karakter/jatidiri bangsa dan kearifan lokal h. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia i. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi/keterbukaan mengakses informasi yang tidak diimbangi kemampuan menangkal atau meng-<i>counter</i> informasi negatif tersebut
	2. Kurang pemahaman tentang prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika dan rendahnya pemahaman terhadap arti penting orientasi serta visi bersama mengenai integritas bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional.
	3. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial
	4. Bermunculnya faham-faham radikal, sapatisme dan terorisme untuk

	mengganggu persatuan dan kesatuan
	5. Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis dikalangan masyarakat dengan melecehkan simbol-simbol negara, serta kecenderungan mengedepankan kepentingan golongan dan kelompok.
	6. Tingginya kuantitas keberadaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan
	7. Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum
	8. Menjaga keberlangsungan konsolidasi kebangsaan dalam memantapkan stabilitas politik dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan nasional.
	9. Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba Belum optimalnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba
	10. Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, sehingga terjadi konflik berlatar Agama, terkait dengan kerukunan, pendirian Rumah Ibadat dan merebaknya aliran agama/kepercayaan
	11. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi kader anggota Patrai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
	12. Penguatan Peraturan Perundang-undangan bidang politik
	13. Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu

**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA MUSRENBANG RKPD
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

Yogyakarta, 15 Maret 2017

**Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas;**

Yth. Sdr. Menteri Keuangan;

Yth. Sdr. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yth. Sdr. Ketua DPRD Istimewa Yogyakarta;

Yth. Sdr. Unsur Pimpinan Instansi Vertikal;

Yth. Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

**Yth. Sdr. Bupati dan Walikota Se- Daerah Istimewa
Yogyakarta;**

**Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta;**

**Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi;**

Para undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Sejak era reformasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memilih kebijakan untuk mengimplementasikan Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Implementasi pemberian otonomi yang seluas-luasnya dimaksud, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu konsekuensi logis dari implementasi otonomi seluas-luasnya dimaksud adalah daerah otonom harus mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah otonom diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan penuh dengan inovasi dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya nanti akan berdampak positif terhadap perwujudan kesejahteraan bangsa.

Bapak/Ibu peserta musrenbang yang berbahagia,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, Daerah melaksanakan pembangunan dengan cara mengimplementasikan serangkaian urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembangunan dilakukan guna meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan tata ruang. Selanjutnya, perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Forum Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang telah disusun pemerintah daerah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “RKPD” merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”. Oleh karena itu:

- Secara substansial, RKPD memuat seluruh program dan kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah;
- Secara formal, RKPD menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian, hasil kesepakatan terhadap RKPD yang telah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, sepenuhnya menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018. DPRD, Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaannya;
- Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam rencana kerja perangkat daerah harus mengutamakan pada kepentingan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan merasakan kehadiran pemerintah daerah

dalam memenuhi kebutuhan layanan dan mendorong peningkatan daya saing daerah;

- Secara faktual, menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2018.

Keberadaan dokumen RKPD haruslah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen rencana Perencanaan jangka menengah Daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan baik selama 20 tahun maupun 5 tahunan.

Adapun potret realisasi penetapan dokumen perencanaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepenuhnya menetapkan secara tepat waktu. Untuk prestasi ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang prestasi ini dapat dipertahankan.

Hadirin Peserta Musrenbang yang Berbahagia,

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seyogyanya memperhatikan Nawa Cita

Jokowi-JK yang diterjemahkan dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional, yaitu:

1. Dimensi pertama, yaitu pembangunan manusia, penyelarasan hendaknya diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.
2. Dimensi kedua, yaitu pembangunan sektor unggulan, penyelarasan agar diarahkan pada upaya terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
3. Dimensi ketiga, yaitu pemerataan pembangunan antarwilayah, penyelarasan prioritas pembangunan daerah agar diarahkan untuk mendukung peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Dengan terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, pemerintah daerah akan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Jokowi-JK, Provinsi D.I. Yogyakarta perlu mengoptimalkan implementasi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan multidimensi. Sehingga diharapkan terjadi penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, mentalitas dan pendidikan, peningkatan produktivitas pertanian,

dan pendapatan daerah, dengan memperhatikan isu strategis Provinsi D.I Yogyakarta, yaitu:

- a) Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.*
- b) Pemerataan dan perluasan pendidikan.*
- c) Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat.*
- d) Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.*
- e) Peningkatan daya saing pariwisata.*
- f) Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.*
- g) Peningkatan infrastruktur dan tataruang.*

Berkaitan dengan pemberian keistimewaaan dalam penyelenggaraan pembangunan di provinsi DIY sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penajaman pencapaian sasaran terhadap Nawa Cita agar diselaraskan dengan kewenangan dalam urusan keistimewaan antara lain: kelembagaan pemerintah DIY, bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Hadirin Peserta Musrenbang yang berbahagia,

Dalam melakukan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, seluruh elemen bangsa indonesia perlu bersatu padu untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif. Hal ini akan mewujudkan kepercayaan dunia internasional untuk mendukung perkembangan perekonomian indonesia yang pada akhirnya akan membantu terwujudnya indonesia yang sejahtera.

Kondisi tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian seluruh elemen bangsa Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengefektifkan koordinasi FORKOMPIMDA, seluruh jajaran terkait mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota, untuk secara terkoordinasi guna melakukan pencegahan dan menangkal gangguan keamanan untuk menciptakan situasi yang aman, tenteram dan tertib dalam melakukan pembangunan daerah.

Dengan telah terpilih dan akan dilantiknya kepala daerah maka kepala daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan Perda tentang RPJMD paling lambat terhitung 6 (enam) bulan sejak kepala daerah dilantik dan menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2018. Dalam kaitan itu, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memberikan kepastian hukum bagi penyusunan dokumen perencanaan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2018 memperhatikan beberapa, antara lain:

- Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, mengacu pada RPJMN untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih;
- RKPD menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2018. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Saudara-saudara peserta Musrenbang yang berbahagia,

Kementerian Dalam Negeri selalu membuka diri untuk bersama-sama dengan seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dalam upaya pembinaan terhadap pemerintahan daerah sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemerintah Daerah diharapkan aktif memberikan dukungan, informasi, masukan, kritikan yang dibutuhkan dalam menciptakan Pemerintahan Nasional yang efektif.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RKPD Tahun 2018 selaras .Selain dari pada itu mengawal konsistensi baik penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2018 mendatang, maupun dalam pelaksanaannya.

Hanya dengan komitmen yang tinggi dan bekerjasama dengan melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan dapat mewujudkan “Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2015-2019.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah.

Selanjutnya saya mengucapkan, selamat mengikuti Musrenbang RKPD Tahun 2018 untuk meraih apa yang dicitakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Sekian dan Terima kasih,
Wabillahittaufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**PADA MUSRENBANG RKPD
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

Disampaikan oleh:
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Yogyakarta, Maret 2017



KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD

Substansial

Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah

Formal

- menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
- Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018
- DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya

Operasional

- memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing.
- Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah

Faktual

instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH

Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014
ttg Pemda
"RKPD merupakan penjabaran
dari RPJMD"

memuat

rancangan kerangka ekonomi
dan prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun"

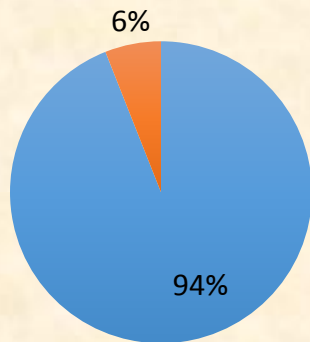


KEMENTERIAN DALAM NEGERI



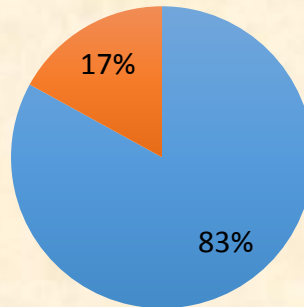
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

RPJPD PROVINSI



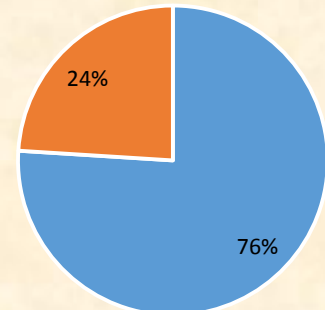
■ sudah ■ belum

RPJMD PROVINSI



■ sudah ■ belum

RKPD PROVINSI



■ Tepat Waktu ■ Terlambat

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



RPJPD

RPJMD = TEPAT WAKTU

RKPD



Prioritas Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

- Mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Diarahkan untuk mengatasi permasalahan terutama terkait dengan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan multidimensi.
- Isu-isu strategis yang harus diperhatikan :
 - 1) *Pelestarian dan pengembangan budaya lokal.*
 - 2) *Pemerataan dan perluasan pendidikan.*
 - 3) *Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat.*
 - 4) *Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.*
 - 5) *Peningkatan daya saing pariwisata.*
 - 6) *Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.*
 - 7) *Peningkatan infrastruktur dan tata ruang.*



UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

**SELURUH UNSUR
PENYELENGGARA PEMDA**



**koordinasikan, sinergikan
program & kegiatan RKPD
berdasarkan RPJMD & RPJMN**



**Dukung agenda prioritas dan
pencapaian sasaran
pembangunan nasional
Tahun 2018
(Dalam RPJMN 2015-2019)**



**Mewujudkan
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA
TAHUN 2015-2019**

***“Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”***



**Bangun komitmen yang tinggi dan
bekerjasama melibatkan seluruh
kelompok & lapisan masyarakat
dalam membangun daerah**

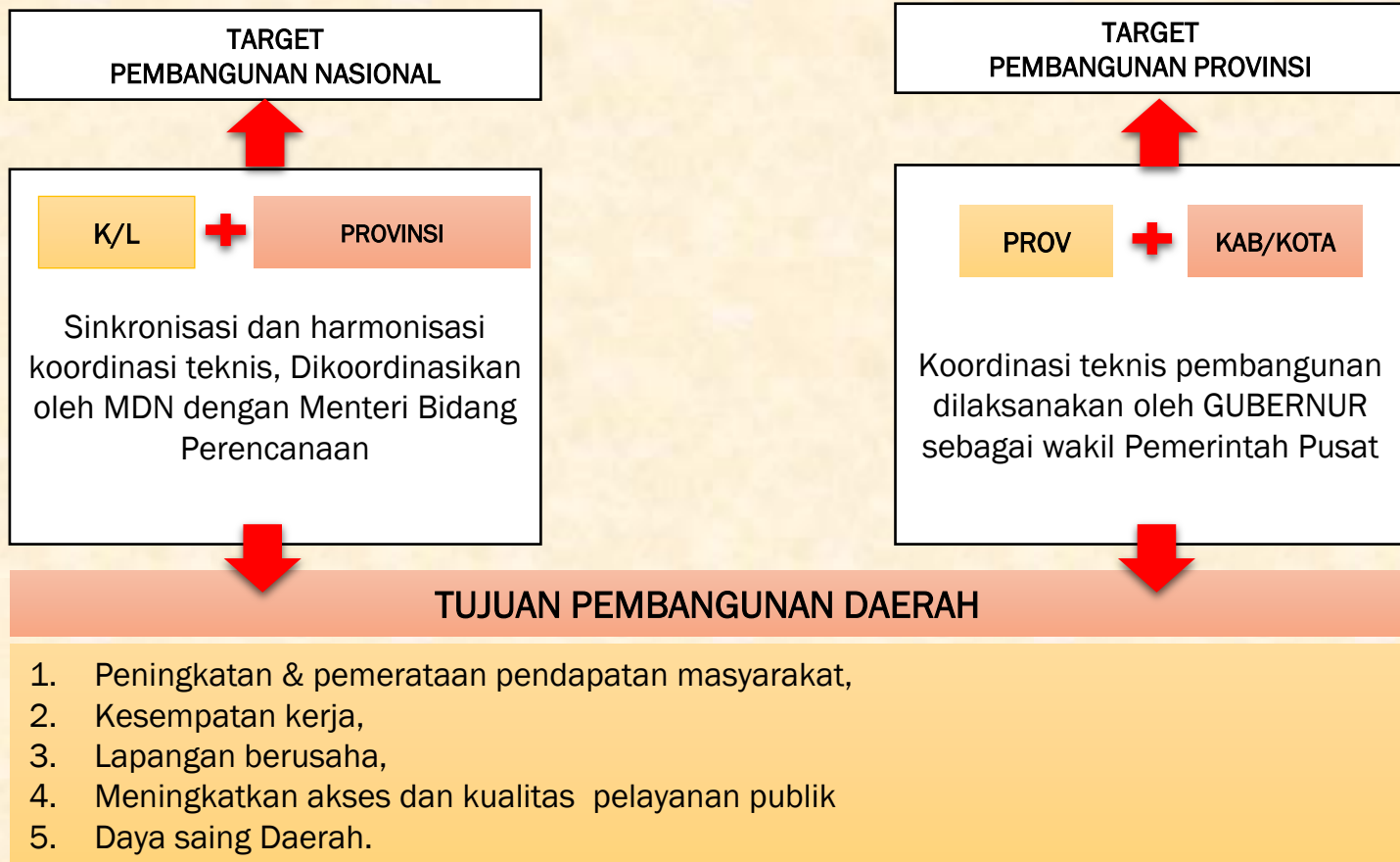


Prioritas Pembangunan Provinsi Nasional RPJMN 2015-2019

- *Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6.4%*
- *Target tingkat Kemiskinan sebesar 10.9 %*
- *Target tingkat pengangguran sebesar 3.4%*



PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259)





PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

RPJMD

mengurangi tingkat kemiskinan & pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sesuai dgn kondisi, potensi, serta permasalahan



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018



3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019

Pembangunan manusia

peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara

Pembangunan sektor unggulan

upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri

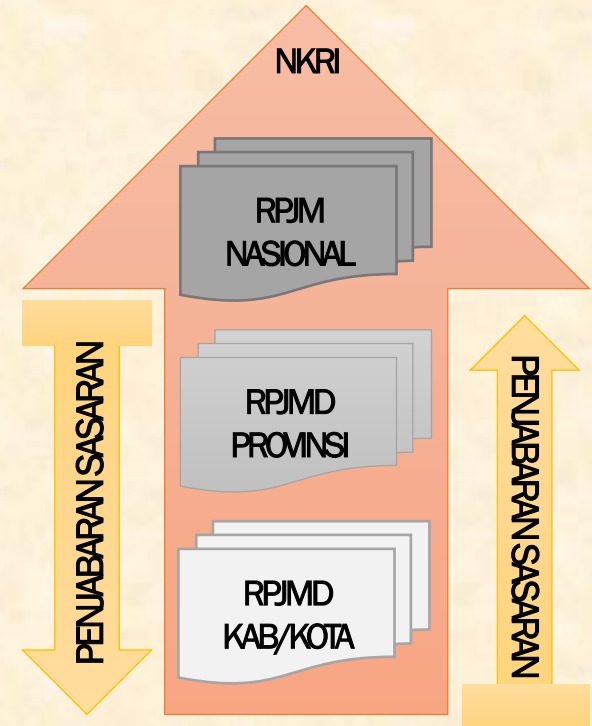
Pemerataan pembangunan antarwilayah

- peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan
- mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah



PENTINGNYA SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan
2. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa:
 - a. Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.
 - b. Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
3. Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya,
4. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya mengandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja.
5. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.
6. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.





SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, sebagai berikut:

1

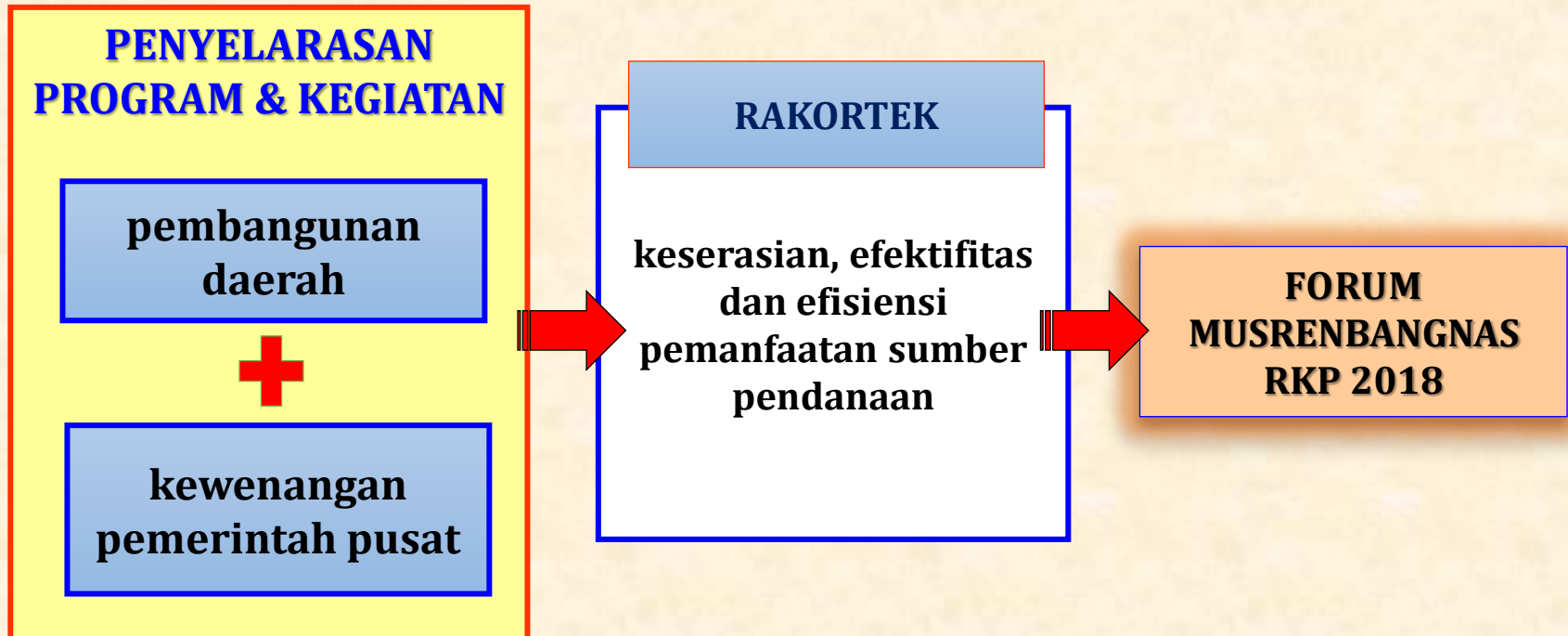
Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 gubernur, bupati/walikota menggunakan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2

Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD, RKP Tahun 2018, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.



SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI DIY

1. PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir yang melakukan kemitraan Provinsi DI Yogyakarta

2. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala regional Prov. DI Yogyakarta

3. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

- *Dukungan Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dsk Tahun 2018*
- *Dukungan Infrastruktur Sumber Daya Air Terhadap Kawasan Pariwisata Tahun 2018*

4. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

Capaian Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 2016



5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

Daerah Irigasi yang Memerlukan Pembangunan Jaringan Tersier (2018) DIY (1.100 Ha)

6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

*Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tahun 2018
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebonagung (SPAB Kertamantul)*

7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

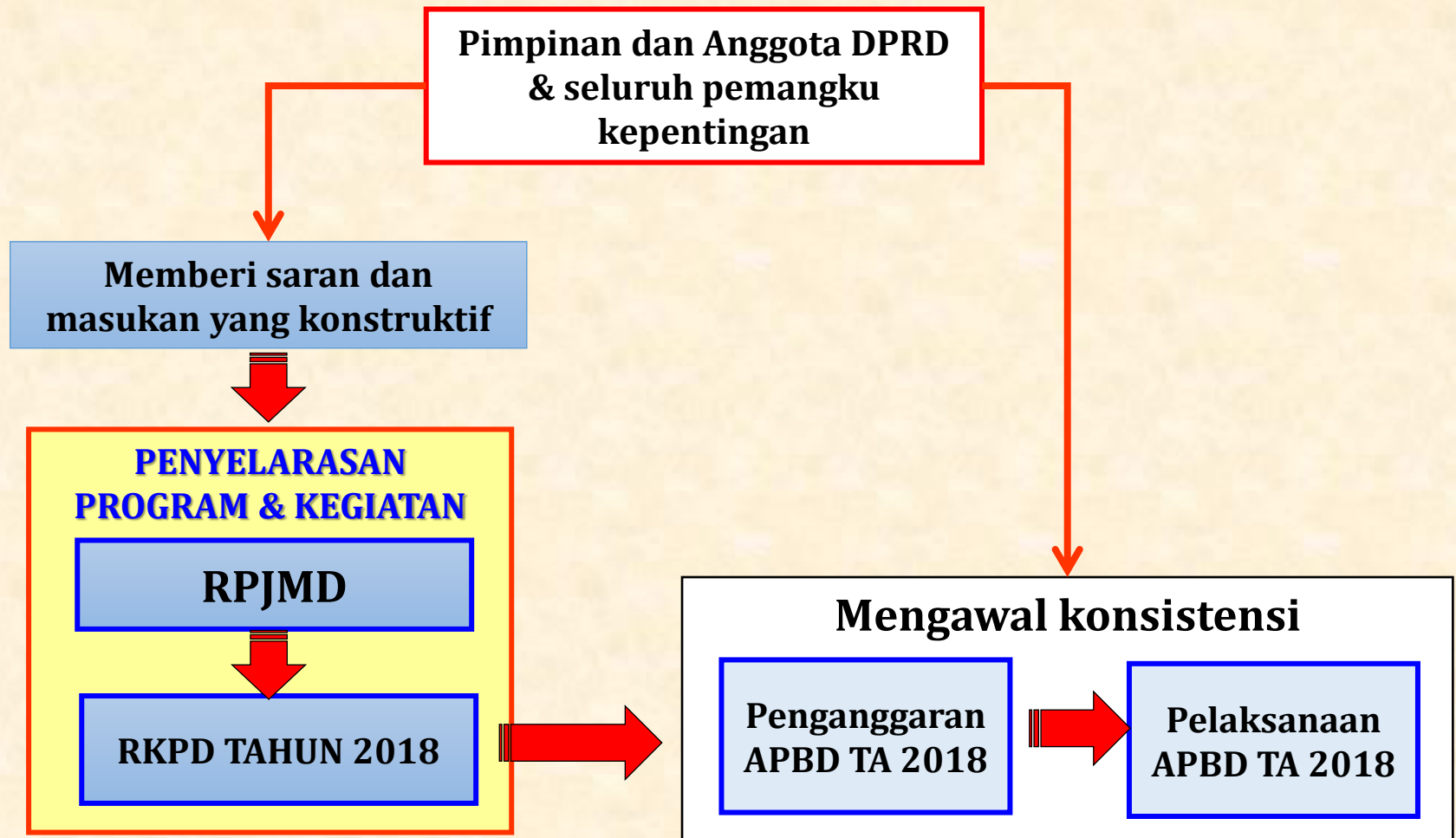
- Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM Provinsi DI Yogyakarta (Gunung Kidul Bantul dan Kulonprogo)*

8. PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

Pembangunan Jalur KA Menuju Bandara Kulon Progo (DED, AMDAL)



PENYELARASAN RKPD TAHUN 2018 DENGAN RPJMD DAN KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018





TERIMA KASIH





**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

TANTANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018

Yogyakarta, 15 Maret 2017



OUTLINE



TANTANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



PEMBELAJARAN 2016 DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN



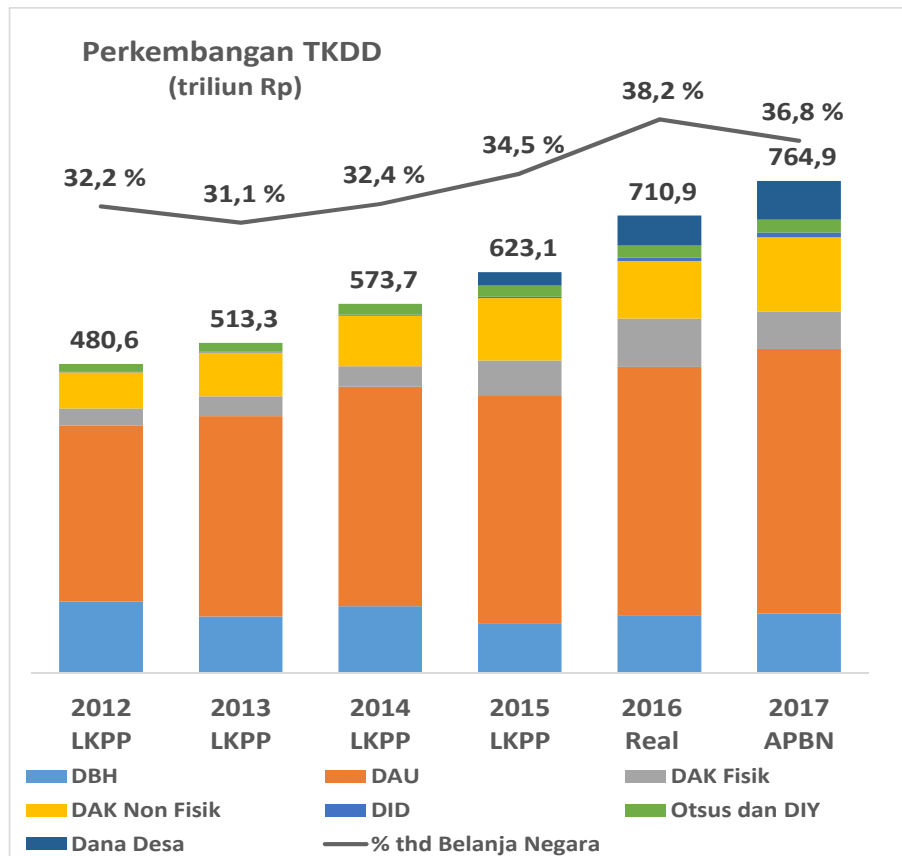
**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA TAHUN 2018**





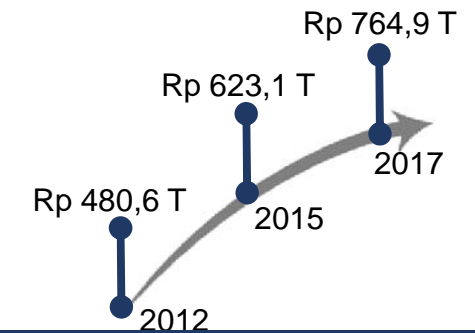
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA #1 Penguatan Desentralisasi Fiskal

Peningkatan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) - konsisten dengan desentralisasi fiskal, namun efektivitas belanja daerah menjadi tantangan selanjutnya....



1

Alokasi TKDD meningkat namun masih terdapat ketimpangan pelayanan publik, tingkat kesejahteraan, & tumpang tindih dengan belanja K/L.



2

Porsi belanja pegawai dalam APBD masih relatif tinggi, sedangkan kenaikan porsi belanja modal masih belum signifikan.

Modal	12,6 %	19,5 %	22,9 %
BELANJA	VS	VS	VS
Pegawai	42,3%	38,2 %	36,8 %
	2012	2014	2016

3

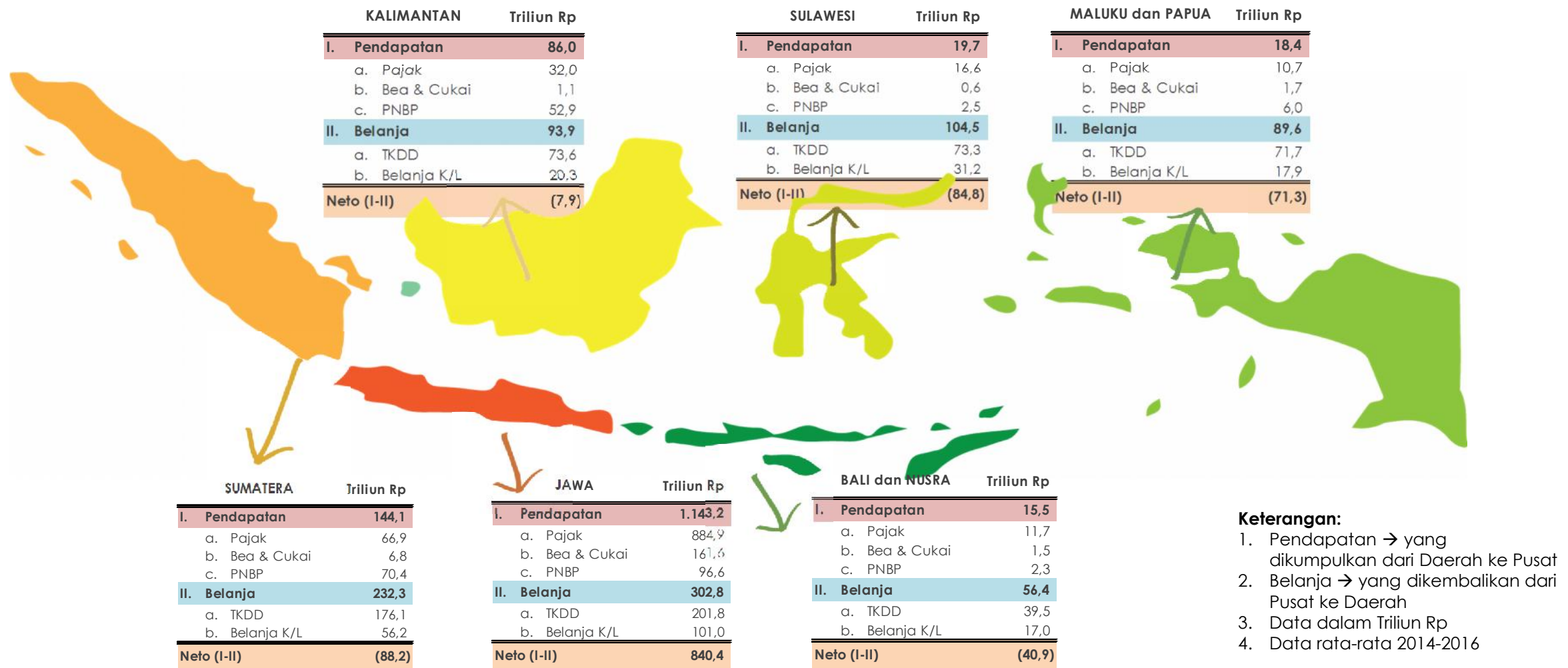
Cash planning yang belum optimal, menyebabkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun.

SiLPA APBD relatif besar, sebagian berasal dari dana transfer bersifat *earmark*.



TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA #2 Ekualisasi Pendapatan & Belanja Antarwilayah

untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkuat eksistensi NKRI....



Kebijakan ekspansi anggaran di luar Jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar Jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa.



TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA #3

Kemandirian Fiskal Daerah Belum Optimal

APBD masih tergantung dari Dana Transfer, karena pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal.....

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan PAD



Peningkatan Basis Data Perpajakan

- Mendata ulang WP & objek pajak
- Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin
- Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)



Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak

Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan pembayar pajak



Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan

- Dibidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
- Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP



Modernisasi

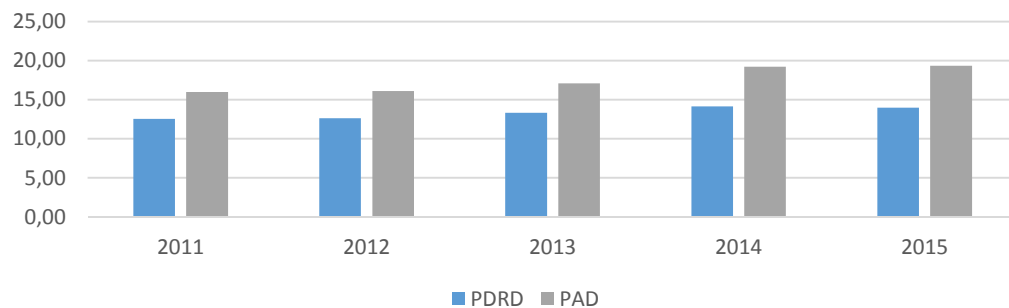
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data.
- Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD, e-payment dan sejenisnya
- Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
- Menyusun SOP setiap pelayanan.



Peningkatan SDM

- Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan.
- Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
- Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

Rasio PDRD dan PAD thd Pendapatan APBD





TANTANGAN & STRATEGI #4

Dana Transfer, Layanan Publik dan Tingkat Kemiskinan

IPM

IPM	2010	2015
Indonesia	66,53	69,55
Provinsi		
Tertinggi	76,31	78,39
Terendah	54,45	56,75
Deviasi	21,86	21,64

KEMISKINAN

Kemiskinan	2010	2016
Indonesia	13,33	10,7
Provinsi		
Tertinggi	36,8	28,4
Terendah	3,48	3,75
Deviasi	33,32	24,65

KEMENTERIAN KEUANGAN



Dana Transfer mendukung:

- peningkatan tingkat layanan publik di daerah, terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- penurunan kesenjangan tingkat kemiskinan antar daerah, terlihat dari penurunan angka gap



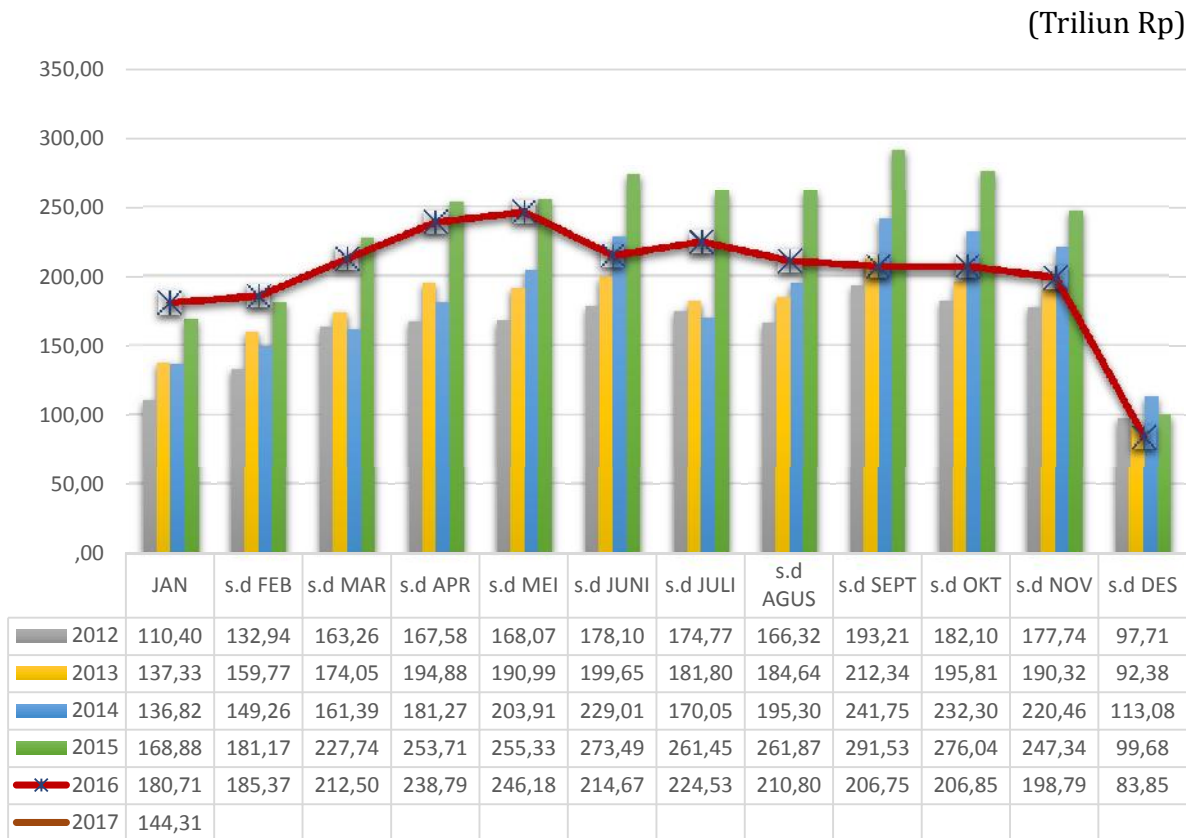
Namun distribusi Dana Transfer yang pro wilayah “miskin” juga belum dapat menurunkan kesenjangan layanan publik, terlihat dari Jarak IPM yang tertinggi dan terendah



TANTANGAN & STRATEGI #5 PENYERAPAN APBD

Besarnya dana *idle* pemerintah daerah menghambat akselerasi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas layanan, dan pengentasan kemiskinan & kesenjangan....

Dana APBD di Perbankan



*Sumber Data: Bank Indonesia, diolah

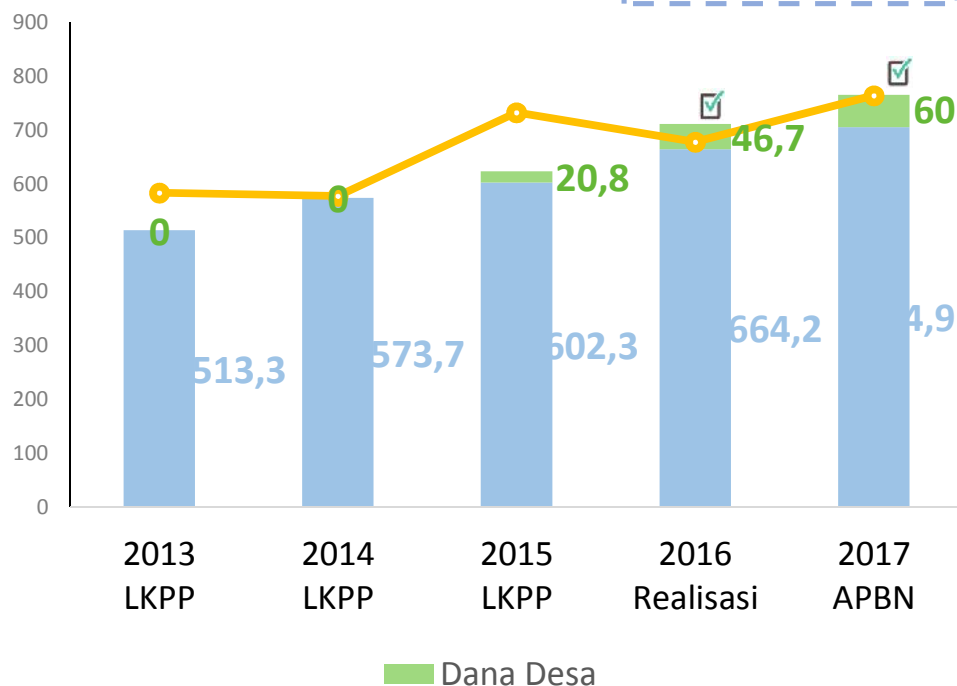
1. SilPA APBD di perbankan relatif tinggi. Pada Des 2012 sebesar Rp97,71 T, dan turun menjadi Rp83,85 T pada Des 2016.
2. Tren 4 tahun terakhir, posisi simpanan pemda di perbankan naik pada Januari s.d. Juni.
3. Pada Semester I, realisasi belanja operasional sebagian pemda lebih besar dari belanja modal (rata-rata 30 % s.d 35%).
4. Pada Oktober s.d. Desember, tren simpanan pemda di perbankan menurun dan berada pada posisi terendah karena belanja pemda menumpuk di akhir tahun.
5. Dengan adanya kebijakan konversi, simpanan pemda pada Maret s.d Desember 2016 menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Des 2016 dibandingkan Des 2015 turun sebesar Rp15,83T.
6. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU tahun 2016 dilakukan kepada 6 daerah sebesar Rp359.0 M (tahap I) dan 3 daerah sebesar Rp210,6 M (tahap-II).



PENINGKATAN KUALITAS PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI BUKTI PENGUATAN NAWACITA DAN DESENTRALISASI

- Sebagai implementasi Nawacita ke 3: “**Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan**”

Total TKDD	513,3	573,7	623,1	710,9	764,9
Belanja K/L	582,9	577,2	732,1	677,6	763,6



- Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu **instrument** penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk:
 - Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas.
 - Penurunan kesenjangan antar daerah.
 - Pengentasan kemiskinan.
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Setiap Dana Transfer memiliki fungsi yang berbeda:
 - DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah.
 - DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.
 - DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan infrastruktur layanan publik.
 - DAK Nonfisik: Mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - DID: memberikan *reward* utk daerah berkinerja baik.
 - Dana Desa: untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.**



PEMBELAJARAN 2016 DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN



- ❑ Adanya **faktor ketidakpastian eksternal**, menyebabkan **perencanaan pendapatan negara harus lebih realistis dan kredibel**.
- ❑ Perlu **ruang penyesuaian** bagi belanja negara, termasuk TKDD:
 - Pagu **DAU tidak final**, sehingga dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan pendapatan negara.
 - Implikasinya: perlu **strategi pengelolaan APBD yang tepat** dan **peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah**.



- ❑ Daerah perlu berperan aktif dalam **penghimpunan penerimaan pajak**, melalui:
 - **Menjaga kepatuhan** atas pajak yang menjadi tanggungjawab APBD, dan
 - **Memberikan sanksi** kepada pihak swasta yang menghindari pajak pusat dan daerah (seperti sanksi perijinan usaha yang menjadi kewenangan daerah).



- ❑ Dengan sumber dana APBN dan APBD yang masih terbatas, **setiap rupiah belanja negara dan daerah harus menghasilkan output/outcome yang maksimal** melalui:
 - **Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah**, (belanja K/L dan transfer ke daerah), harmonisasi kegiatan antarprogram, antarkegiatan, antarwilayah, dan antar sumber pendanaan.
 - Optimalisasi penggunaan **Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur** yang berorientasi pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan.
 - **Penyaluran Dana Transfer Khusus dan Dana Desa berbasis kinerja pelaksanaan** (penyerapan dan ketercapaian output) melalui KPPN agar lebih efisien dan efektif.



- ❑ Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih merata, perlu dilakukan :
 - **Sinergi pendanaan**, baik yang bersumber dari belanja K/L, TKDD, maupun APBD.
 - **Optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan** melalui pinjaman maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)



Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018

DTU

- Pengalokasian DBH tetap berdasarkan prinsip *by origin*
- Penyempurnaan Formula DAU dengan **memperhitungkan pengalihan kewenangan** antar tingkat pemerintahan.
- Penyempurnaan **formulasi penghitungan PDN Neto**
- Afirmasi kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan
- **Penyempurnaan formulasi kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam penghitungan alokasi DAU**
- **Pemantauan penggunaan DTU** untuk belanja infrastruktur layanan publik

DTK

- **Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik** sesuai prinsip *money follow program*, **berbasis proposal**, serta **sinkronisasi DAK** dg belanja K/L
- **Penguatan peran Propinsi** dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah
- **peningkatan kualitas DAK Nonfisik** melalui penerapan performance based & pemantauan penggunaan

DID

- Penyederhanaan dan **penajaman kriteria** pengalokasian DID
- Penilaian kinerja melalui pengelompokan/ klastering berdasarkan antara lain :
 - ✓ Kinerja tata kelola keuangan daerah
 - ✓ Kinerja pelayanan publik
 - ✓ Kinerja pengentasan kemiskinan

- Dana Desa:** **Kebijakan penggunaan** untuk mengatasi kemiskinan & kesenjangan, serta kesejahteraan masyarakat desa
- Penggunaan fokus pada program/kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak langsung thd:
- ✓ pertumbuhan ekonomi,
 - ✓ peningkatan lapangan kerja,
 - ✓ pengurangan kemiskinan di desa,
 - Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.



POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAU 2018



DAU bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (*equalization grant*)



Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto pada APBN-P. Untuk itu, Daerah perlu mempersiapkan untuk menyesuaikannya dalam APBD-nya.



Menyempurnakan formulasi DAU dengan bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) yang semakin menurun secara gradual. Sehingga formulasi DAU semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal untuk penyelenggaraan pembangunan daerah



Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut



Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan.



Untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi (*Perlu menjadi bahan evaluasi dalam Raperda APBD oleh Kemendagri*)



Pokok-Pokok Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (1)

- Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip **money follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L.**
- Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang, kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan capaian output/outcome.
- Pengalokasian DAK Fisik dengan berpedoman pada prinsip sebagai berikut:
 - ✓ Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
 - ✓ Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah
 - ✓ Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah
 - ✓ Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan
- **Penguatan peran Propinsi** dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah.
- Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan **meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik** (berbasis spatial) → digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan (*rewards and punishment pengalokasian DAK Fisik*).

Kementerian Teknis terkait perlu fokus pada pengawalan pencapaian output/outcome DAK



Pokok-pokok Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (2): Tahap Perencanaan

Pemerintah Pusat

1. Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik
2. Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik
3. Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional
4. Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional
5. Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK
6. Penyiapan aplikasi (*e-Planning*)
7. Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK

Pemerintah Provinsi

Bappeda

Sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan DAK:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan **prioritas pembangunan daerah (RKPD)** Provinsi
2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK
3. Melakukan **Sinkronisasi Usulan** DAK dengan RPJMD dan RKPD
4. Mengkoordinasikan Penentuan **target dan lokasi output** DAK Fisik yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah

Sebagai wakil pemerintah pusat:

1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi
2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota

Pemerintah Kab/Kota

Bappeda

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan **prioritas pembangunan daerah (RKPD)** Kab./Kota
2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD
3. Melakukan **sinkronisasi Usulan** DAK semua SKPD dg RPJMD dan RKPD Kab./Kota
4. Mengkoordinasikan penentuan **target dan lokasi output** DAK Fisik Kab./ Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah



Pokok-pokok Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (3): Prinsip-prinsip Pengalokasian DAK Fisik





Pokok-pokok Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (4): Rancangan Jenis dan Bidang DAK Fisik

Berbasis kebutuhan per bidang
(*sector based*), untuk urusan wajib
layanan dasar

DAK REGULER

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Jalan
4. Air Minum
5. Sanitasi
6. Perumahan dan Permukiman
7. Pasar
8. IKM
9. Pertanian
10. Kelautan dan Perikanan
11. Pariwisata

Berbasis kewilayahan (*area
based*), untuk Lokpri pada
kategori daerah perbatasan,
kepulauan dan tertinggal

DAK AFIRMASI

1. Kesehatan (Puskesmas)
2. Perumahan dan Permukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. Air Minum
6. Sanitasi

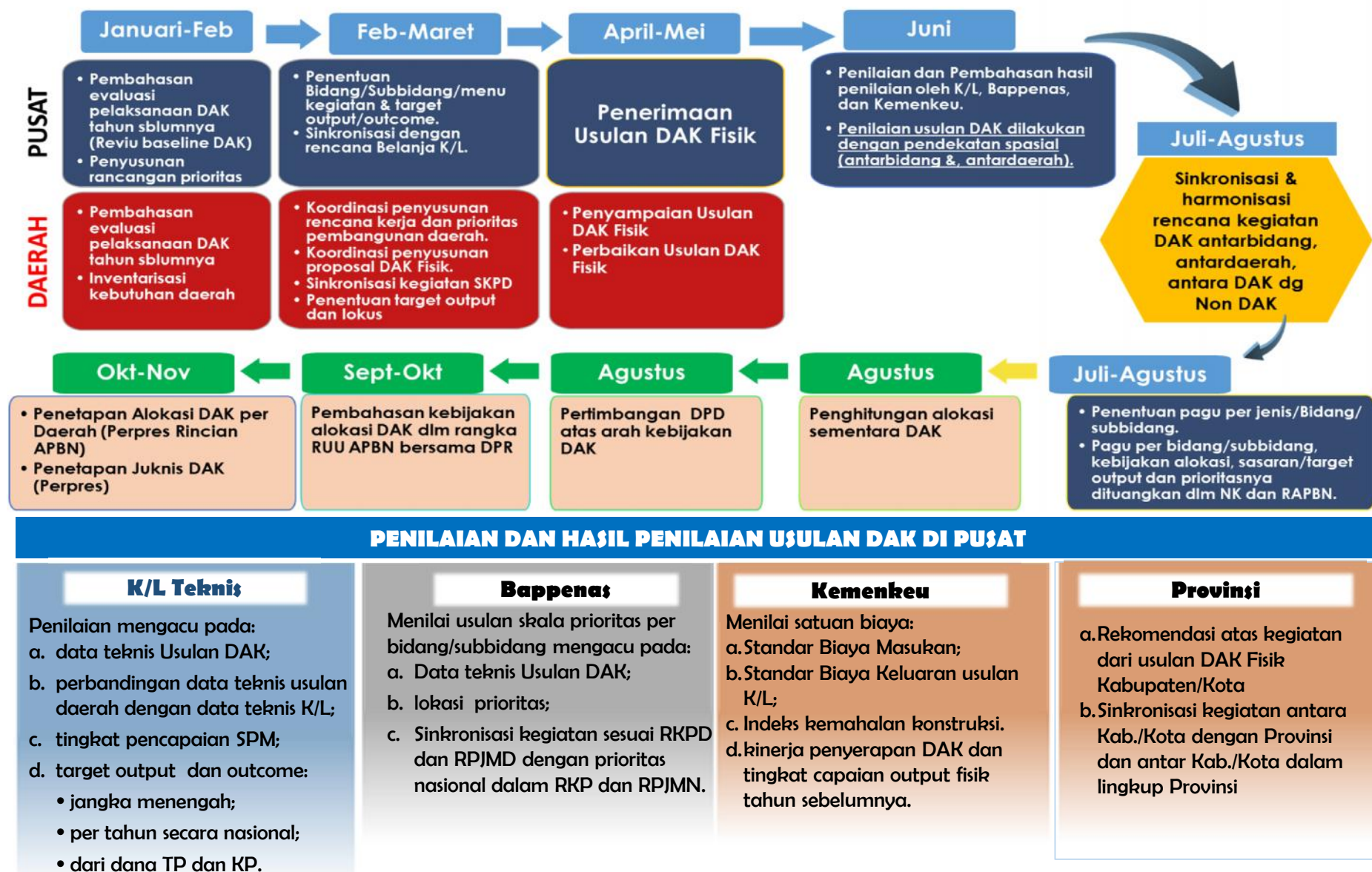
Berbasis program prioritas
nasional (program based), sesuai
Rencana Kerja Pemerintah tahun
2018

DAK PENUGASAN

1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS
Pratama)
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Energi Skala Kecil
9. Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Pokok-pokok Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (5): Mekanisme Pengalokasian





Pokok-pokok Kebijakan DAK Nonfisik 2018



Pengalokasian berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas daerah



Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan)



Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan *performance based dan pemantauan penggunaan DAK Nonfisik*

JENIS DAK FISIK 2018

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
- c. Tunjangan Profesi Guru PNSD
- d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- e. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
- f. BOK dan BOKB
- g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan
- h. Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan



Pokok-pokok Kebijakan Dana Insentif Daerah Tahun 2018

- Refocusing arah dan tujuan DID, yaitu memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja daerah dalam:
 - pengelolaan keuangan daerah; dan
 - menggunakan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif untuk mempercepat penyediaan layanan dasar publik dan mengurangi.
- Penajaman kriteria pengalokasian DID, melalui pengelompokan/klastering penilaian atas pencapaian kinerja tertentu, serta menambahkan kriteria *e-planning*, *e-budgetting*, *e-procurement*, PTSP, penurunan gizi buruk, serta penurunan kemiskinan.
- Melakukan evaluasi atas efektivitas pemanfaatan DID di daerah.



Pokok-pokok Kebijakan Dana Desa Tahun 2018 (1)

1

Janji kampanye : Alokasi minimal Rp1 M s.d. Rp.1,4 M tiap desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2

- Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014

3

Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek **pemerataan & keadilan**, untuk:

- Mempercepat pengentasan kemiskinan.
- Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa.
- Memberikan afirmasi pada desa sangat tertinggal dan tertinggal.

4

Afirmasi basis kewilayahan untuk daerah: perbatasan, tertinggal, & kepulauan

5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan diarahkan untuk:

pro-poor:

- pelayanan kesehatan masyarakat miskin
- pelayanan pendidikan masyarakat miskin
- perbaikan gizi masyarakat miskin

Pro-job:

- pelaksanaan kegiatan secara swakelola
- kegiatan dilakukan secara padat karya
- Pemberian pelatihan untuk kewirausahaan
- Pemberian pelatihan *business plan*
- Pemberdayaan masyarakat desa

6

Penguatan kapasitas tenaga pendamping

Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa (2): Perubahan Penyaluran

EXISTING			MENJADI		
Dari RKUN ke RKUD (KPPN JAKARTA II)	<u>Tahap I : 60%, bulan Maret</u> Syarat:	1. Perda mengenai APBD TA berjalan;	Dari RKUN ke RKUD (KPPN DAERAH)	<u>Tahap I : 60%, paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan Juli</u> Syarat :	1. Perkada mengenai Penjabaran APBD TA berjalan;
		2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan			2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan
		3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya.			3. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
	<u>Tahap II : 40%, bulan Agustus</u> Syarat:	1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan paling kurang 50% ;		<u>Tahap II : 40%, paling cepat bulan Agustus</u> Syarat :	1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90% ;
		2. Laporan DD Tahap I telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50% .			2. Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa paling kurang 75%; capaian output paling kurang 50% .
Dari RKUD ke RKD (Oleh Walikota/ Bupati)	<u>Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN</u> Syarat:	1. Perdes APB Desa;	Dari RKUD ke RKD (Oleh Walikota/ Bupati)	<u>Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN</u> Syarat:	1. Perdes APB Desa; dan
		2. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya			2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
	<u>Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN</u> Syarat:	1. Laporan penggunaan DD Tahap I paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan.		<u>Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN</u> Syarat:	1. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan paling kurang 75%; dan capaian output paling kurang 50% .



PELAKSANAAN DANA DESA: TANTANGAN, KEBIJAKAN & IMPLIKASI

TANTANGAN

Penggunaan Dana Desa belum optimal

Kapasitas Perangkat Desa belum memadai

Penyediaan Pendamping Desa:
• kompetensi belum memadai,
• proses rekrutmen lama,
• mobilisasi yang terlambat

Peraturan perundangan terkait Desa yang diterbitkan K/L berpotensi tumpang tindih

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa

KEBIJAKAN

Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prioritas kegiatan pembangunan pelayanan dasar skala desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Penyelenggaraan pelatihan tatakelola keuangan desa & pelatihan pengelolaan dana desa

Percepatan rekrutmen pendamping desa yang berkompeten

Sinergi peraturan perundangan.

Mengoptimalkan peran perwakilan Kemenkeu di daerah dalam hal penyaluran, pemantauan dan evaluasi

IMPLIKASI

Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Pelaporan.

Pengelolaan Dana Desa lebih baik

Dampak Dana Desa signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian

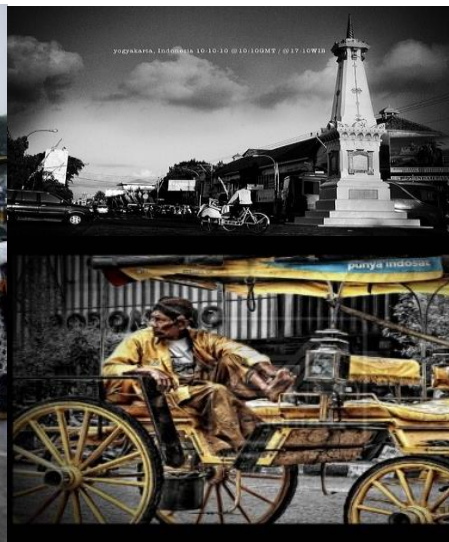


Terima Kasih



PENGHARGAAN REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA

2017





BAPPEDA DIY

penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha



Reka Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian dari proses penilaian **Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Nasional** yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sebagai ajang penilaian kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan yang handal melalui proses partisipatif ;

Reka Cipta Bhakti Nugraha diberikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah;

Penghargaan ini bertujuan mendorong Kabupaten/Kota di DIY menyiapkan rencana pembangunan agar lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan implementatif;



BAPPEDA DIY

penghargaan **Reka Cipta Bhakti Nugraha**

TROFI REKA CIPTA 2013 - 2016



2013	KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2014	KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2015	KABUPATEN SLEMAN
2016	KABUPATEN KULON PROGO

TROFI REKA CIPTA 2017



2017 ... ?



TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA 2017 OLEH TIM PENILAI PROVINSI

PENILAIAN TAHAP I

(Penilaian Teknis terhadap dokumen RKPD) (40%)

- Keterkaitan (15%)
- Konsistensi (25%)
- Kelengkapan dan Kedalaman (40%)
- Keterukuran (10%)
- Inovasi Kebijakan (10%)



PENILAIAN TAHAP II

(Penilaian terhadap proses penyusunan dokumen RKPD) (60%)

- Proses Perencanaan Dari Bawah (*bottom-up*) (25%)
- Proses Perencanaan Dari Atas (*top-down*) (20%)
- Proses Perencanaan Teknokratik (25%)
- Proses Perencanaan Politik (10%)
- Inovasi Proses & Program Daerah (20%)

Terbaik 1 dalam Penilaian RKPD Kabupaten/Kota meraih **REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA** ini, selanjutnya akan mengikuti proses penilaian di tingkat pusat, bersaing dengan 34 perwakilan kabupaten/kota se-Indonesia untuk memperebutkan **ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA** yang diselenggarakan oleh BAPPENAS



KRITERIA PENILAIAN TAHAP I

PENILAIAN DOKUMEN RKPD KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2017

BAPPEDA DIY

Kriteria	Indikator
KETERKAITAN (15%)	1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2017 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%)
	2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2017 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2017 (10%)
KONSISTENSI (25%)	3. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kab/Kota 2017 dengan isu strategis (10%)
	4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%)
	5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2017 dengan pagu anggaran SKPD (5%)
	6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2017 dengan program/kegiatan SKPD (5%)
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%)	7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah, pendanaan, kebijakan keuangan daerah tahun 2017, dan uraian strategi serta arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%)
	8. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (7,5%)
	9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (7,5%)
	10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (7,5%)
	11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (7,5%)
	12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan yang berorientasi pada bencana alam, perubahan iklim dan berwawasan lingkungan (5%)
KETERUKURAN (10%)	13. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2017 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) dan prakiraan maju – berdasarkan matriks (5%)
	14. Tersedianya kerangka pendanaan untuk program/kegiatan prioritas (5%)
INOVASI KEBIJAKAN (10%)	15. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah yang inovatif dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (HTIS) (7,5%)
	16. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup Kab/Kota . (2,5%)



BAPPEDA DIY

KRITERIA PENILAIAN TAHAP II

VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017

Kriteria	Parameter	Indikator
DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%)	1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2017	Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kab/Kota 2017 (12,5%)
	2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2017	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 2017 (12,5%)
DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)	3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2017 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2017	Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2017 dengan RKP 2017 (10%)
	4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2017 dan RKP 2017	Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2017 yang mendukung RKP 2017 (10%)
TEKNOKRATIK (25%)	5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2017	Persentase program dan kegiatan RKPD Kabupaten 2017 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (12,5%)
	6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2017	Tingkat kapasitas perencana Bappeda Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten 2017 (12,5%)
POLITIK (10%)	7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2017	Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2017 dengan usulan DPRD Kabupaten (5%)
	8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2017	Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2017 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (5%)
INOVASI (20%)	9. Inovasi pada proses perencanaan	Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (10%)
	10. Inovasi program pembangunan daerah	Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (10%)



BAPPEDA DIY

Tim Penilai Independen *Tingkat Provinsi*



Prof. Ir. Achmad Djuanedi, MUP., Ph.D. (MPKD - UGM)
Praktisi / Akademisi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si (MAP - UGM)
Akademisi
Sosial Ekonomi



Retno Widodo Dwi Pramono, M.Sc., Ph.D. (MPKD - UGM)
Akademisi
Perencanaan Kota dan Pembangunan Daerah



Sri Purnaningsih, SIP., MPA (MAP - UGM)
Peneliti / Praktisi
Perencanaan Pembangunan Daerah



Wasingatu Zakiyah, SH (IDEA Yogyakarta)
Praktisi
Sosial Kemasyarakatan



Arrohman Mardiansyah, SIP., MM (PT. Sinergi Visi Utama)
Praktisi / Peneliti
Kebijakan Publik



BAPPEDA DIY

penghargaan **Reka Cipta Bhakti Nugraha 2017**

TERBAIK III

**DIBERIKAN KEPADA :
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Gunungkidul
Handayani



TERBAIK II

DIBERIKAN KEPADA :
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SLEMAN





BAPPEDA DIY

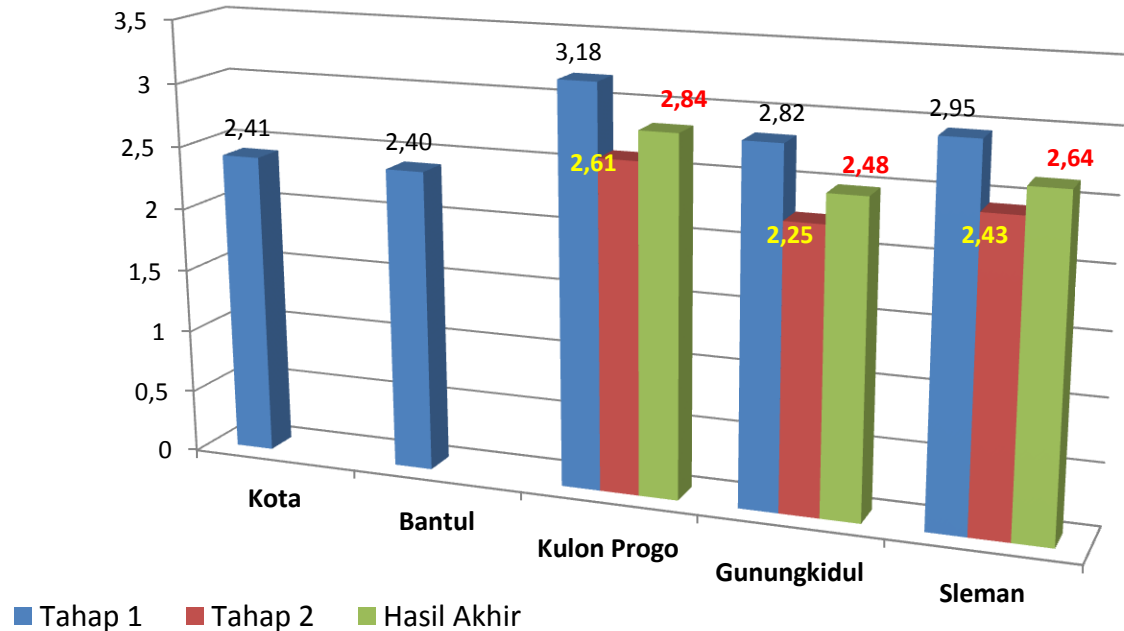
TERBAIK I

DIBERIKAN KEPADA :
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULONPROGO





Hasil Penilaian *Reka Cipta Bhakti Nugraha*



- Tahap I Penilaian Dokumen RKPD Kab/Kota se-DIY 20 – 25 Februari 2017
- Tahap II Verifikasi dokumen dan menyampaikan penjelasan proses perencanaan pembangunan dihadapan tim penilai provinsi : tanggal 1 dan 3 Maret 2017 oleh 3 besar hasil Penilaian Tahap I yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul dengan menghadirkan stakeholder kabupaten (DPRD, SKPD, Desa/Kecamatan, swasta, LSM, dan pihak terkait)
- Finalisasi penilaian dengan pembobotan dan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 9 Maret 2017

Selamat untuk Para Pemenang

*Ayo Gumregah Sesarengan mBangun
Daerah Istimewa Yogyakarta*

Matur Nuwun

